

**PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN  
DI DESA LUMBIR KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN  
BANYUMAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah**

**Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokero**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos.)**

**Oleh:**

**FAISAL ABIDIN**

**NIM. 1917104041**

**PROGAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT  
FAKULTAS DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Faisal Abidin  
NIM : 1917104041  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)  
Fakultas : Dakwah  
Judul Skripsi : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa  
Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas

Menyatakan dengan ini sesungguhnya skripsi ini adalah hasil karya saya atau penelitian saya sendiri dan bukan dari karya orang lain, serta jika terdapat kutipan dalam skripsi ini, saya telah menulis dari sumber yang didapat dengan footnote dan daftar pustaka.

Purwokerto, 13 Juni 2023

Peneliti,



Faisal Abidin  
NIM. 1917104041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS DAKWAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

**PENGESAHAN**  
**Skripsi Berjudul**

**Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir  
Kabupaten Banyumas**

Yang disusun oleh **Faisal Abidin NIM. 1917104041** Program Studi **Pengembangan Masyarakat Islam Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat** Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada hari **Selasa tanggal 13 Juni 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. Nawawi, M. Hum  
NIP. 197105081998031003

Sekretaris Sidang/Penguji II

Anas Azhimi Qalban, M.Kom  
NIDN. 2012049202

Penguji Utama

Agus Sriyanto, M.Si  
NIP. 197509071999032002

Mengesahkan,

Purwokerto, ... 26-6-2023 ..

Dekan



Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.  
NIP. 196911101994031005

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan skripsi dari:

Nama : Faisal Abidin

NIM : 1917104041

Jenjang : S-1

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah

Judul Skripsi : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Lumbir  
Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

*Wassalamualiakum Wr. Wb*

Purwokerto, 13 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



**Dr. Nawawi, M. Hum**  
**NIP.197105081998031003**

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Qs. Al Baqarah:286)



## **PERSEMBAHAN**

Terucap rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibu Tasmi dan Bapak Nur Syahid, orang tua yang sangat supportif memberikan dukungan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Beliaulah yang mengantarkan suksesnya penulis dalam dunia pendidikan dengan berjuang untuk membiayai pendidikan hingga selesai.
2. Kakak saya Misbahul Umam yang sangat saya sayangi.
3. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai almamater yang saya banggakan.
4. Fakultas Dakwah yang telah menjadi wadah optimalisasi diri secara akademik.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin* segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, peneliti panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT sebagai pencipta alam semesta dan segala rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”**. Sholawat dan salam peneliti curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak di akhirat nanti.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Maka dari itu, dengan rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag, Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basith, M. Ag., Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Nur Azizah, M. Si, Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat.
4. Dr. Nawawi M. Hum, Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tempat, tenaga, dan pikirannya dalam mengarahkan serta membimbing penelitian skripsi ini.
5. Dr. Asyhabuddin, M. A, Selaku Penasehat Akademik.
6. Para dosen dan staff administrasi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Orang tua dan kakak saya dan keluarga besar yang telah memberikan do'a dan dukungan dan mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman kelas PMI angkatan 2019, keluarga Pondok Pesantren Darul Falah dan sahabat yang telah membantu dan mendukung saya menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu yang telah membantu penelitian ini.

Semoga Allah SWT, selalu membalas semua kebaikan, dukungan serta kerjasama yang telah diberikan dengan balasan yang lebih baik. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari akan kekurangan yang dimiliki, sehingga dalam penyusunan skripsi ini tentunya terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik dari segi keilmuan maupun kepenulisan. Oleh karenanya, penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan dimasa mendatang. Dan peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembacanya.



# PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN Di DESA LUMBIR KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS

FAISAL ABIDIN

NIM. 1917104041

[abidinfaisal949@gmail.com](mailto:abidinfaisal949@gmail.com)

## ABSTRAK

Skripsi ini dilator belakangi dengan adanya permasalahan dalam bidang pembangunan, yaitu tidak meratanya pembangunan infrastruktur jalan desa. Munculah rumusan masalah yaitu bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan Desa Lumbir serta Apa hambatan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Upaya yang dapat dilakukan yaitu mendorong masyarakat agar turut serta atau berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan. Tujuannya, untuk memberdayakan dan meningkatkan aksesibilitas warga, sehingga dapat mencapai pemerataan pembangunan dan mempermudah akses dalam meningkatkan bidang perekonomian masyarakat.

Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, peneliti melakukan penelitian lapangan. Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang diambil berjumlah 8 orang yaitu kepala desa, sekretaris desa, kaur perencanaan, kasi kesejahteraan, kepala dusun, dan ketua RW di Desa Lumbir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembangunan infratsruktur jalan di Desa Lumbir, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemeratan pembangunan infrastruktur jalan Desa Lumbir memiliki langkah atau tahapan yang dilakukan yaitu diawali dari musyawarah di lingkungan RW (Musdus) guna membahas rancangan pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat dan tokoh masyarakat, dan usulan hasil musyawarah tersebut dibawa ke desa yang nantinya dituangkan dalam RKP (Rencana Kegiatan Pemerintahan) yang dibahas bersama-sama dalam acara Musrenbangdes (Musyawarah Kegiatan Pembangunan Desa) untuk menentukan RKP yang didalamnya adalah kegiatan pembangunan infrastruktur dan hasil dari musyawarah tersebut akan dimasukkan kedalam RAB (Rancangan Anggaran Belanja) Desa Lumbir.

**Kata Kunci:** Pemerataan Pembangunan, Infrastruktur Jalan

**PEMERATAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN  
Di DESA LUMBIR KECAMATAN LUMBIR KABUPATEN BANYUMAS**

**FAISAL ABIDIN**  
**NIM. 1917104041**  
[abidinfaisal949@gmail.com](mailto:abidinfaisal949@gmail.com)

**ABSTRACT**

This dilator is motivated by problems in the field of development, namely the uneven development of village road infrastructure. The formulation of the problem emerged, namely how the village government's efforts are in equitable distribution of road infrastructure development in Lumbir Village and what are the obstacles in equitable distribution of road infrastructure development in Lumbir Village, Lumbir District, Banyumas Regency. Efforts that can be made are encouraging the community to participate or participate in preparing and determining plans for development activities. The aim is to empower and increase the accessibility of citizens, so as to achieve equitable development and facilitate access in improving the community's economic sector.

To answer the research objectives, researchers conducted field research. The research method is descriptive qualitative with data collection techniques, observation, interviews, and documentation. There were 8 informants taken, namely the village head, village secretary, head of planning, head of welfare, head of hamlet, and head of RW in Lumbir Village. The results of this study indicate that in the construction of road infrastructure in Lumbir Village, it starts from the planning, implementation and accountability stages.

The results of the study show that in the equitable distribution of road infrastructure development in Lumbir Village there are steps or stages that are carried out, namely starting from deliberations in the RW (Musdus) environment to discuss the development plan to be carried out, involving all elements of society starting from community institutions and community leaders, and proposals the results of the deliberation are brought to the village where they will be included in the RKP (Government Activity Plan) which is discussed together in the Musrenbangdes (Development Development Activity Meeting) to determine the RKP which includes infrastructure development activities and the results of the deliberation will be included in the RAB (Draft Budget) of Lumbir Village.

**Key Word:** Equitable Development, Road Infrastructure

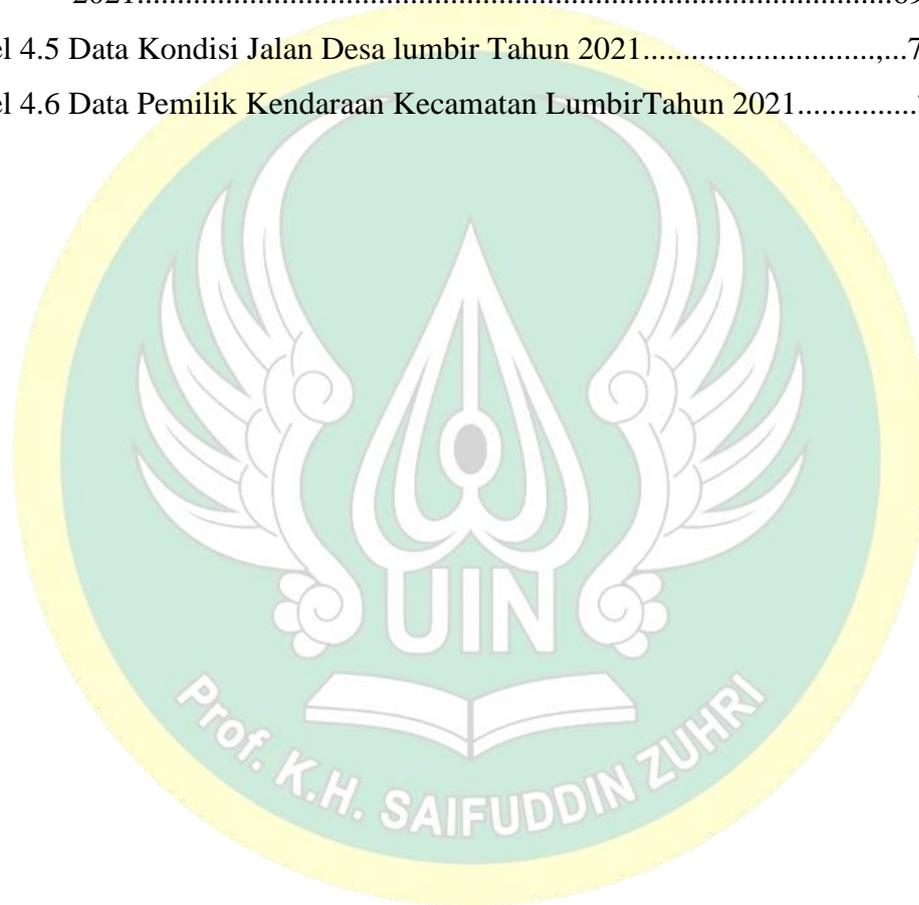
## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Dan Manfaat .....	13
E. Telaah Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pembangunan .....	19
1. Pengertian dan makna Pembangunan .....	19
2. Konsep-konsep Pembangunan .....	21
3. Tujuan Pembangunan.....	22
4. Dampak Positif dan Negatif.....	23
5. Peran Pemerintah dalam Pembangunan.....	24
B. Infrastruktur Jalan .....	25
1. Devinisi Infrastruktur Jalan.....	27
2. Jalan sebagai <i>Public Service</i> .....	28

3. Manfaat Jalan bagi Pertumbuhan Ekonomi .....	28
4. Jenis-jenis Jalan.....	29
5. Biaya Pembangunan Jalan.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
1. Observasi.....	39
2. Wawancara.....	40
3. Dokumentasi .....	42
F. Teknik Analisi Data .....	42
1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data) .....	43
2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data) .....	43
3. <i>Conclusion Drawing/Verification/Kesimpulan</i> .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Desa Lumbir .....	45
B. Temuan Hasil Penelitian Pada Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.....	53
C. Analisis Pendukung dan Penghambat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
C. Penutup.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel: 4.1 Daftar Nama-nama Perangkat Desa Lumbir.....	48
Tabel: 4.2 Rencana Pembangunan Fisik Desa Lumbir Tahun 2021 .....	58
Tabel: 4.3 Program Pembangunan Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas 2021 .....	61
Tabel 4.4 Data Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Jalan Desa lumbir Tahun 2021.....	69
Tabel 4.5 Data Kondisi Jalan Desa lumbir Tahun 2021.....	70
Tabel 4.6 Data Pemilik Kendaraan Kecamatan LumbirTahun 2021.....	71



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Profil LKPJ Desa Lumbir Tahun 2021 .....65



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu pembangunan di Kabupaten Banyumas yang berlangsung di Desa Lumbir merupakan salah satu desa yang perlu ditingkatkan infrastrukturnya di sejumlah daerah yang berbeda. Desa ini masih memiliki kondisi jalan yang buruk, yaitu; Jalan Lingkar RW 01 Rusak, P=1.200 x 2 m, rusak berat, Jalan Desa Butulan RW 04-RW 05, P=5.000 sebagian besar rusak, Jalan Cikadu RW 02, P=3.000 m x 2 m, kondisi baik, Jalan Pangawaren, P=4.000 m x 2 m, kondisi rusak, Jalan RW 08 Cilombang, P=10 m x 2 m, kondisi rusak berat. Kondisi saat ini yang baru diperbaiki yaitu: RW 03 P=300 x 2 m, RW 02 P=250 2,8 m, serta RW 08 P=350 x 2 m. Sebenarnya, pemerataan pembangunan tidak sepenuhnya dapat diukur dari jumlah pembangunan baru yang dilakukan. Pemerataan pembangunan dapat dikatakan terjadi ketika ada upaya untuk memperbaiki ketimpangan dalam pembangunan di wilayah atau daerah yang tertinggal, seperti pengembangan infrastruktur dasar dan aksesibilitas ke layanan public yang sama bagi semua lapisan masyarakat. Meskipun masih banyak wilayah yang terdapat kerusakan dan belum memperoleh pembangunan yang memadai, namun jika terdapat upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut dan memberikan fasilitas dasar bagi masyarakat di wilayah tersebut, maka dapat dikatakan sebagai pemerataan pembangunan. Selama pemerintah memberikan perhatian dan sumber daya yang sama kepada wilayah yang lebih tertinggal, maka terjadi pemerataan pembangunan meskipun masih terdapat beberapa wilayah yang belum terdapat pembangunan baru.

Letak Desa Lumbir yang merupakan daerah pegunungan, dan keragaman budaya masyarakatnya mengharuskan dibangunnya sarana infrastruktur fisik untuk mempermudah akses jalan desa, dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatannya. Fakta bahwa mayoritas orang bergantung pada pertanian

untuk mata pencaharian mereka menunjukkan kepatuhan masyarakat terhadap adat dan tradisi dan pentingnya masyarakat terhadap ekonomi. Menurut perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas, kesempatan kerja yang tidak memadai dengan pertumbuhan penduduk sering menimbulkan tantangan terhadap mata pencaharian masyarakat.

Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dengan koordinat bujur  $X=676994,55865$  dan koordinat lintang  $Y=138968,0471$ . Luas Wilayah Desa Lumbir adalah 1.811,420 Hektar, merupakan Desa paling luas di Wilayah Kecamatan Lumbir. Secara administratif Desa Lumbir termasuk Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Lumbir yang terletak di ujung barat Kabupaten Banyumas. Desa Lumbir adalah Desa di Kecamatan Lumbir yang merupakan Ibu Kota Kecamatan yang dilewati oleh 3 Jalan Nasional yang menghubungkan antara Jawa Barat-Jawa Tengah-Yogyakarta, serta jalan alternatif Ajibarang-Gumelar-Gumelar-Lumbir. Sebagian wilayah Desa Lumbir memiliki topografi dataran rendah hingga rangkaian perbukitan disebelah utara yang sekaligus menjadi hulu sungai Cihaur.

Sebagai Desa yang terletak di Ibu Kota kecamatan, merupakan keuntungan besar bagi masyarakat Desa Lumbir dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Karena hampir semua fasilitas pemerintah berada di Desa Lumbir. Dengan demikian masyarakat tidak perlu repot-repot apabila akan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan instansi-instansi tertentu.

Desa Lumbir terdiri dari 3 (tiga) Wilayah Kadus, yang terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) dan 60 Rukun Tetangga (RT), yaitu:

1. Kadus I terdiri dari 3 Wilayah Rukun Warga/Rw, yaitu :
  - a. RW I dengan nama Grumbul Lumbir terdiri dari 10 RT
  - b. RW II dengan nama Grumbul Cikadu terdiri dari 6 RT
  - c. RW III dengan nama Grumbul Pangawaren terdiri dari 5 RT
2. Kadus II terdiri dari 2 Wilayah Rukun Warga/RW, yaitu:
  - a. RW IV dengan nama Grumbul Butulan terdiri dari 10 RT
  - b. RW V dengan nama Grumbul Ciwera terdiri dari 7 RT

3. Kadus III terdiri dari 3 Wilayah Rukun Warga/RW, yaitu:
  - a. RW VI dengan nama Grumbul Kalisalak terdiri dari 9 RT
  - b. RW VII dengan nama Grumbul Krapyak terdiri dari 5 RT
  - c. RW VIII dengan nama Grumbul Cilombang terdiri dari 8 RT

Adapun batas-batas Wilayah Desa Lumbir; Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Karanggayam dan Desa Cidora, Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Kedunggede, Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Dermaji dan Tanah Perhutani, Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Kedunggede dan Tanah Perhutani.

Tingkat angka kemiskinan Desa Lumbir yang masih tinggi menjadikan Desa Lumbir harus bisa mencari peluang lain yang bisa menunjang peningkatan taraf ekonomi bagi masyarakat. Kekayaan Sumber Daya Alam yang ada di Desa Lumbir amat sangat mendukung baik dari segi pengembangan ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu letak Geografis Desa yang cukup strategis dan merupakan Desa penyangga hutan hasil bumi dan jalur transportasi yang mempertemukan 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Lumbir dan Kecamatan Karangpucung. Pembangunan masyarakat pedesaan diharapkan mandiri dan harus mempengaruhi keseimbangan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, Desa Lumbir masih perlu melakukan pembenahan terhadap sarana dan prasarannya guna memudahkan berbagai kegiatan masyarakat.

Pembangunan nasional sangat bergantung pada pertumbuhan desa. Pemerintah menentukan keberhasilan pembangunan nasional, termasuk pembangunan desa, melalui berbagai kebijakan yang dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang lebih sering disebut Undang-Undang Desa disahkan sebagai wujud pengakuan dan penghormatan Negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya. Dua aspek terpenting pembangunan desa yang dituangkan dalam Undang-Undang Desa disebut sebagai “Desa membangun” dan

“Membangun Desa”.<sup>1</sup> Ketika sebuah desa berkembang, ia memiliki kendali penuh atas pengelolaannya sendiri. Memajukan dan mengembangkan desanya sendiri, pemerintah desa dan masyarakat berkolaborasi.

Desa Membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan, oleh desa, dari desa, dan untuk desa. Kemendes mempunyai tanggung jawab penuh dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa demi mewujudkan kemandirian desa dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.<sup>2</sup> Landasan digunakannya konsep *Good Governance* sebagai landasan nilai penyelenggaraan pemerintahan, yang berorientasi pada pengembalian harga diri rakyat demi membangun kembali citra pemerintahan sebagai pelayan yang adil. *Governance* merupakan pengaturan, yang dalam konteks *Good Governance* ada yang menyebut tata pamong.

Konsep otonomi daerah yang bersifat desentralisasi yakni memberikan kebebasan kepada daerah untuk membangun wilayahnya, termasuk pembangunan ekonominya. Suatu daerah yang dianggap daerah otonomi jika di daerah itu tidak dikuasai oleh suatu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi, daerah modal, sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintahan daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya untuk membantu kemitraan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan usaha-usaha baru.<sup>3</sup>

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan menjadi pedoman atau bahan serta dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat berdasarkan

---

<sup>1</sup> Djuni Pristianto, *Penyusunan RPJM desa*, (Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015), hlm 13.

<sup>2</sup> Zulfikri Amanda, “Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, <http://catatanpamong.blogspot.co.id/2014/01/undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang.html>, diakses pada 10 Februari 2017

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2018), hlm 73-74.

suatu sistem yang dibentuk dari unsur-unsur perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan dengan melihat secara utuh tahapan-tahapan perencanaan yang diawali dari penyusunan perencanaan tingkat kelurahan sampai tingkat kota sehingga membentuk suatu pengertian yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur, guna pemanfaatan serta pengalokasian sumber-sumber data yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu, dengan memanfaatkan berbagai sumber yang ada, secara otoritas yang bersifat menyeluruh, dengan berpegang pada asas prioritas.<sup>4</sup>

Pemerintah Desa dalam melakukan proses pembahasan perencanaan pembangunan berasaskan skala prioritas serta berkordinasi dengan seluruh unit kerja pemerintah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), desa juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Hal lain yang mendukung perencanaan ini yaitu perlu faktor-faktor yang menyebabkan terlaksananya pembangunan secara merata dan khususnya di bidang peningkatan perekonomian harus didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang merupakan skala prioritas pada perencanaan pembangunan guna memperlancar arus barang dan jasa demi peningkatan ekonomi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut diatas tentang sarana dan prasarana dalam strategi pembangunan maka dipandang perlu suatu kombinasi kebijaksanaan dan program yang bertujuan untuk mempengaruhi pola dan laju pertumbuhan ekonomi, dalam strategi pembangunan daerah mencakup berbagai program yaitu, program pembinaan kelembagaan, program penanaman modal, program prasarana fisik, sosial, dan ekonomi serta program sarana dan prasarana infrastruktur.

---

<sup>4</sup> Heryanti, *“Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat)”* (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah : Lampung, 2018)

Akhir-akhir ini banyak diperbincangkan mengenai pemerataan dan pertumbuhan ekonomi “Johnston dan Clark mengungkapkan bahwa pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicapai bersamaan dengan penerapan strategi pembangunan yang didasari atas kelancaran arus barang.”<sup>5</sup> Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa laju dan pola pertumbuhan ekonomi daerah mengarah ke pendistribusian barang dan jasa.

Pembangunan infrastruktur sarana untuk membuka peluang bagi suatu daerah dalam arus barang dan jasa dalam pertumbuhan ekonomi baik dari usaha tingkat atas maupun usaha tingkat menengah hingga kecil. Salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, layanan telekomunikasi dan pengadaan berbagai fasilitas untuk kegiatan ekonomi.

Usaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di pedesaan terutama bertujuan untuk memacu peningkatan perekonomian masyarakat, dengan adanya pemerataan pembangunan perekonomian masyarakat dapat meningkat, karena pemerataan pembangunan merupakan salah satu alternative untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pembangunan desa merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik desa yaitu dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan desa akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan pemasaran hasil pertaniannya, mengangkut hasil pertanian agar lebih mudah dan lain-lain.

Pada saat ini sudah ada pembangunan dilakukan dengan pembiayaan dari pemerintah. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. Hal itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju kea

---

<sup>5</sup> Faisal Kasryno, *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1984), hlm 386.

rah yang lebih baik. Jalan merupakan suatu lintasan yang menghubungkan suatu tempat lainnya. Itulah sebabnya jalan juga merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat disuatu tempat untuk meningkatkan pembangunan diberbagai bidang yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya.

Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan. Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No.4 Tahun 2014, mengatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, membangun sarana dan prasarana desa, menumbuhkan ekonomi masyarakat, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk menjadikan kehidupan masyarakat desa lebih baik, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup.<sup>6</sup>

Sistem pembangunan infrastruktur desa perlu membuahkan hasil sesuai dengan apa yang telah dilakukan selama ini. Untuk membuat kehidupan desa lebih baik, Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 sumber pendapatan desa: (1) pendapatan daerah, (2) bagi hasil dan restribusi kabupaten/kota, dan (3) dana perimbangan keuangan pusat dari daerah, (4) pendanaan pemerintah, (5) hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, serta sumbangan lain yang dianggap sah.<sup>7</sup>

Menurut Parsons, pemberdayaan adalah proses dimana individu memperoleh kekuatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan memberikan pengaruh atas peristiwa kehidupan. Gagasan bahwa orang dapat memiliki dampak tidak hanya pada kehidupan mereka sendiri, tetapi juga pada kehidupan orang-orang yang mereka cintai. Peduli adalah pusat

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>7</sup> Adiarto, dkk, "Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Logas Tanah Daratan Kabupaten Kuantas Singingi", Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, (Vol 4, No 1, Januari-Juni 2013), hlm. 2-3

pemberdayaan.<sup>8</sup> Tiga dimensi pemberdayaan diwakili oleh indikator: kompetensi populis, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif.<sup>9</sup> Karena Islam menganggap pemberdayaan masyarakat sebagai signifikan, perspektif Islam tentang pemberdayaan menggunakan kerangka kerja yang komprehensif dan strategis.<sup>10</sup> Dalam konteks Pemberdayaan Masyarakat Islam, pemberdayaan menjadi pelajaran bagi masyarakat tentang bagaimana bekerja secara mandiri untuk meningkatkan kualitas hidup dalam kaitannya dengan kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat. Kenyataan bahwa pemberdayaan akan menghasilkan pembangunan jangka panjang adalah satu alasan mengapa pemberdayaan masyarakat sangat penting bagi Islam. Ia akan terus mampu meningkatkan standar hidup yang lebih tinggi dengan hal-hal seperti ini.

Pembangunan infrastruktur tentu tidak terlepas dari segi pemerataan pembangunan itu sendiri agar dirasakan hasilnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur yang merata tentu memiliki dampak yang sangat luas terhadap masyarakat serta memberi rasa keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Pemerataan pembangunan merupakan sarana kebutuhan masyarakat sehingga memberikan rasa simpati kepada pemerintahan.

Proses pembangunan adalah suatu perubahan yang lebih maju, dalam hal ini pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan peningkatan perekonomian melalui sarana umum, sementara sarana ini lebih berfokus pada pembangunan dipusat kota, sehingga masyarakat migran merasa jauh dari jangkauan pembangunan, pembangunan yang paling diutamakan pada masyarakat migran yaitu terjangkaunya akses perekonomian sampai masuk batas kota dengan konsep pemerataan pembangunan infrastruktur, hal ini dapat memperlancar arus barang dan jasa serta mempengaruhi peningkatan

---

<sup>8</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Refika Aditama: Bandung, 2014), hlm. 58-59.

<sup>9</sup> Ibid, Edi Suharto, hlm. 63.

<sup>10</sup> Mutthoriq, dkk. "Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2 , No 3, hlm. 1 426-432.

dan pemerataan perekonomian, selain itu pemerataan pembangunan infrastruktur juga dapat memperlancar arus barang dan jasa pada pemerataan pendapatan bagi masyarakat pedalaman.

Cara paling efektif dan tercepat untuk memberdayakan masyarakat pedesaan untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (baik masyarakat umum dan masyarakat kurang mampu) serta pejabat pemerintah yang menerapkan kebijakan pembangunan yang reaktif. Bila dibandingkan untuk pembangunan desa yang mempekerjakan pekerja proyek atau pekerja dari desa lain, hasil dari pengembangan masyarakat langsung lebih efektif dan efisien. Salah satu cara yang paling efektif untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan mendorong masyarakat untuk mengenali kebutuhan dan keinginan untuk gotong royong dan menumbuhkan rasa gotong royong diantara warga desa. Hal ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Mempersiapkan masyarakat untuk terus mengelola program pembangunan secara mandiri merupakan langkah awal dalam tahap berkelanjutan, atau pengelolaan sarana dan prasarana. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyiapan ini agar masyarakat mampu mengambil keputusan pembangunan yang rasional dan berkeadilan. Selain itu, mereka harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, mengelola berbagai potensi sumberdaya, serta lebih menyadari hak dan tanggung jawabnya dalam pembangunan. Mencapai keberhasilan tersebut, pertimbangan yang dilakukan adalah: (1) swadaya masyarakat merupakan penggerak utama proses pembangunan, (2) masyarakat mampu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengerahkan berbagai sumber daya bagi proses pembangunan. Masyarakat telah mengembangkan kebiasaan merencanakan kegiatan pembangunan secara demokratis, terbuka, dan cara partisipatif, (3) meningkatkan kemampuan pemerintah untuk lebih tanggap terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain penyediaan dana dan bantuan, (4) tersediannya fasilitator atau konsultan atas permintaan masyarakat atau pemerintah daerah sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan, dan memungkinkan

masyarakat untuk berkolaborasi dengan para pihak dan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk melakukan proses pembangunan.

Dilihat dari penjabaran diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji mengenai **“Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”**.

## **B. Penegasan Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran terhadap istilah dalam penelitian ini maka perlu adanya penjelasan permasalahan yang ada dalam pembahasan skripsi ini, sehingga topik yang disajikan dapat dibahas secara jelas, sehingga mudah dipahami dan dimengerti. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

### **1. Pemerataan Pembangunan**

Konseptualisasi pemerataan pembangunan diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternative yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga Negara untuk memenuhi aspirasi yang paling manusiawi yaitu koordinasi yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Terwujudnya alternative yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan, serta mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecah masalah dan pembinaan nilai-nilai moral etika umat.

Secara umum, pemerataan pembangunan memberikan makna bahwa kita dapat memberikan pengertian pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan sehingga pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih searah sehingga terdapat cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan.

Pemerataan pembangunan adalah salah satu amanah sila kelima pancasila yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Hal tersebut dapat dilihat dari Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2) dan (3) yang berisikan: Ayat (2): “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup banyak orang dikuasai oleh negara*”. Ayat (3): “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Artinya, sumber daya yang merupakan hajat hidup rakyat banyak harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut kemudian membentuk apa yang disebut sebagai pemerataan pembangunan.

## 2. Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan ekonomi, sosial dan keagamaan bukan hanya diperkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. Melalui proyek, sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu juga, infrastruktur sebagai salah satu kelancaran dalam suatu barang, uang dan informasi dari satu pasar kepasar lainnya. Kondisi ini akan memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah sehingga bisa dibeli oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang penghasilannya lebih rendah, jadi, perputaran jasa, manusia, uang, dan informasi turut menentukan pergerakan harga di pasar-pasar. Dengan kata lain, bahwa infrastruktur jalan menetralsisir harga-harga barang dan jasa antar daerah (antar kota dan kampung-kampung).<sup>11</sup>

Pemahaman secara konseptual infrastruktur merupakan asset fisik yang dirancang dalam system sehingga memberikan pelayanan public yang penting. Oleh karena itu, infrastruktur merupakan bagian-bagian dari prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam suatu system. Olehnya itu dibutuhkan berbagai faktor yaitu pendorong

---

<sup>11</sup> Hermanto, H., Meiyani, E., & Risfaisal, R. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Layang A.P Pettarani Di Kota Makassar. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 7 (1), 198–205. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v7i1.2620>

kebutuhan infrastruktur, dampak pembangunan infrastuktur serta pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, keberadaan infrastruktur sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi sosial karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi bagi dunia usaha maupun bagi sosial kemasyarakatan. Demikian juga infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu daya saing dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan.

Pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan dapat memperluas populasi sosial keagamaan dan sekitarnya. Prinsip akuntabilitas, transparansi, nilai dan keadilan harus menjadi landasan bagi keberadaan infrastruktur dalam jangka panjang. Akibatnya, pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan keberlanjutan. Infrastruktur yang dimaksud peneliti adalah infrastruktur yang berupa jalan yang ada di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Dari pengertian diatas dapat kita pahami bahwa dampak pembangunan infrastruktur adalah pengaruh kuat usaha untuk rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara berencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu pembangunan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berlandaskan latar belakang tersebut, rumusan masalah berikut menjadi fokus penelitian ini:

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas?

## **D. Tujuan dan Manfaat**

### 1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dan pendukung dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

### 2. Manfaat Penelitian

Diharapkan para pembaca akan mendapatkan manfaat berikut dari penelitian ini:

#### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian generasi selanjutnya dan memperkaya pengetahuan di perguruan tinggi yang ada di Purwokerto khususnya UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.

#### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur jalan desa.

## **E. Telaah Pustaka**

Memahami lebih lanjut mengenai penelitian yang penulis teliti dengan tema “Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”.

Skripsi yang ditulis oleh Khumaira Aprilia, dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Berdasarkan temuan penelitian, regulasi yang dibentuk oleh pemerintah pusat, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014, terlibat dalam tahapan

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban proses penganggaran. Pelaporan dan pelaksanaan Nagari Rao Rao masih dalam tahap awal Pemanfaatan Aset Dana Desa di bidang peningkatan masih timpang. Banyak daerah yang memerlukan pembangunan namun belum menerimanya melalui Dana Desa. Hambatan, khususnya mendapat izin pembangunan dari pemilik tanah, menjadi penyebab ketimpangan tersebut. Karena membantu petani dalam kegiatan sehari-hari, maka proyek pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa di Nagari Rao Rao memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat dan sangat berpengaruh.<sup>12</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Annisa Inayatul Aini, dengan judul “Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2015 Dalam Perspektif Ekonomi”, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh panjang jalan terhadap pembangunan ekonomi kota Bandar Lampung?, bagaimana pengaruh transportasi (banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang) terhadap pembangunan ekonomi kota Bandar Lampung? Dan bagaimana Pengaruh Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi di Kota Bandar Lampung tahun 2009-2015 dan mendeskripsikan bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap pembangunan ekonomi di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda. Data didapatkan dari data sekunder yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2009-2015. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama panjang jalan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Bandar Lampung. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji signifikansi parametrik individu (Uji t) dengan nilai t hitung sebesar 1,877 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,13185. Sedangkan Transportasi (banyaknya

---

<sup>12</sup> Khumaira Aprilia, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2021.

mobil angkutan barang dan penumpang) tidak berpengaruh secara signifikan juga terhadap pembangunan ekonomi di Kota Bandar Lampung. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t dengan nilai thitung sebesar -1,158 lebih kecil dari tabel sebesar 2,13185, kedua, dalam pandangan pembangunan ekonomi islam memandang bahwa pembangunan ekonomi merupakan peningkatan kesadaran insan atas tanggung jawabnya terhadap berbagai hakikat dan masalah mengikuti urutan keutamaan yang sah, dan amal perbuatan yang ikhlas, berhikmah, berani, sederhana dan adil. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pembangunan di Kota Bandar Lampung tidak berpengaruh secara signifikan oleh infrastruktur (panjang jalan dan banyaknya mobil angkutan barang dan penumpang). Sebagaimana dikemukakan oleh Joni Tamkin bahwa pembangunan ekonomi dalam islam menghendaki adanya kebijakan terutama kebijakan yang bersumber dari sumber daya insani atau manusia itu sendiri sebagai objektif utama dari kebijakan pembangunan.<sup>13</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Tanjung Hapsari, dengan judul “Pengaruh Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mengenai permasalahan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang telah berlangsung lama dan dana investasi yang dikeluarkan cukup banyak. Namun masih banyak masalah yang di alami Negara kita khususnya mengenai perencanaan yang lemah, kualitas yang belum mencukupi, kualitas rendah dan sebagainya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor produksi yang diwakili oleh infrastruktur (jalan, listrik, telpon, dan air) mempunyai pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap output yang diwakili oleh variable pendapatan perkapita agar dapat di tentukan arah kebijakan dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel yang kurun waktu 2004 hingga 2009 untuk 26 provinsi di Indonesia. Untuk mencari hasil yang BLUE (*Bear Linier Unbiased*

---

<sup>13</sup> Anisa Inayatul Aini dengan judul “Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Bnadar Lampung Tahun 2009-2015 Perspektif Ekonomi Islam. (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015), h. IV.

*Extimator*) maka dilakukan uji panel seperti *Chow Test* dan *Hausmen Test* sehingga di dapatkan model panel data *Fixed Effect* untuk menyelesaikan data dengan karakteristik seperti diatas kemudian dilakukan uji asumsi klasik seperti *multikolinieritas*, *heteroskedastisitas*, dan *autokorelasi*. Hasil akhirnya adalah dari keempat variable bebas diatas mempunyai dua variable yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu, jalan, dan listrik. Dan dua variable lagi yang tidak mempunyai pengaruh yang signifikan yaitu telepon dan air.<sup>14</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Murba, dengan judul “Studi Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone”, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembangunan infrastruktur dan faktor-faktor penghambat berjalannya implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Erecinnong, lalu penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu pertama secara primer yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan kemudian kedua secara sekunder yaitu dengan menggunakan kajian pustaka, melalui buku, jurnal, skripsi, laporan tahunan, dan situs internet yang terkait dengan penelitian.<sup>15</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Sudarni, dengan judul “Politik Anggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”. Hasil penelitian menggambarkan bahwa mekanisme pengelolaan anggaran infrastruktur di Desa Bululoe berasal dari APBD kemudian dilanjutkan pada SKPD untuk selanjutnya dimusyawarahkan dalam musrembang, setelahnya diserahkan pada Kelurahan atau Desa (pemerintah setempat), untuk kemudian disalurkan ketiap-tiap Dusun. Namun dalam proses pengelolaan anggaran pembangunan infrastruktur di Desa Bululoe tidak berjalan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini karena adanya

---

<sup>14</sup> Tanjung Hapsari, dengan Judul “Pengaruh Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia”, (*Skripsi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019*), h. IV.

<sup>15</sup> Murba, dengan Judul “Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ericinnong Kecamatan Bontotani Kabupaten Bone” (*Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan politik Jurusan Ilmu Politik, 2017*), h.IV.

kepentingan elit politik dalam proses pengalokasian anggaran, belum lagi banyaknya pungutan yang membebani pembangunan infrastruktur di Desa Bululoe, sebagian masyarakat masih belum puas karena beberapa program pembangunan khususnya perbaikan infrastruktur hingga saat ini belum terealisasi.<sup>16</sup>

Penjabaran yang membedakan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu terdapat pada variabel. Dimana pada penelitian-penelitian terdahulu pada variabelnya tidak hanya terfokuskan pada pembangunan infrastruktur saja, ada yang fokus pada pembangunan daerah, ekonomi, adapula tentang pembangunan sarana prasarana. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas menjadi fokus dalam penelitian ini yang belum pernah diteliti sebelumnya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab pembahasan antara lain yaitu:

**BAB I** berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** berisi tentang penjabaran mengenai kajian teori yang terdiri dari: Teori Pembangunan dan Infrastruktur Jalan.

**BAB III** berisi tentang metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, terdiri dari: Jenis dan Pendekatan Penelitian, Variabel Penelitian, Sumber Data, Lokasi, Subjek dan Objek Penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Teknis Analisis Data.

**BAB IV** membahas mengenai hasil penelitian yang terdiri dari: Gambaran Umum/Penyajian Data, Hasil Temuan Penelitian dan Hasil Analisis Data.

---

<sup>16</sup> Sudarni, dengan judul “Politik Anggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jenepono”, (*Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015*). H. IV.

**BAB V** berisi penutup yaitu mencakup: Kesimpulan, Saran-saran, dan Penutup.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Pembangunan

#### 1. Pengertian dan makna pembangunan

Pembangunan memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari sudut mana kita melihatnya dan waktu yang dituju. Pembangunan dilakukan karena adanya kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi. Pembangunan tersebut bisa berupa sarana dan prasarana seperti jembatan, jalan, pembangunan ibadah dan sarana transportasi. Pembangunan itu sendiri selalu berkaitan erat dengan bidang ekonomi. Dalam sudut pandang sosiologi, menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Menurut Soerjono Soekanto “proses pembangunan terutama bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, baik secara spiritual maupun material”.<sup>17</sup>

Dalam sudut pandang ekonomi pembangunan sendiri berkaitan dengan ekonomi. Atau lebih ditunjukkan kepada pengertian pembangunan ekonomi. Menurut Meier dalam Marzali dari sudut pandang ekonomi mengemukakan “pembangunan berarti suatu proses dimana *real per capita income* dari suatu Negara meningkat dalam suatu masa panjang, dan dalam masa yang bersamaan jumlah penduduk yang dibawah garis kemiskinan, tidak bertambah, dan distribusi pendapatan tidak makin senjang”.<sup>18</sup>

Pengertian pembangunan menurut para ahli sebagaimana yang dikutip oleh Redatin Parwadi adalah sebagai berikut:

a. Pendapat dari Rogers dan Schoemaker

Pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial, dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk mendapatkan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Persada, 2013), 360.

<sup>18</sup> Amri Marzali, *Antropologi & Pembangunan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 62.

pendapatan per-kapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik. Pembangunan adalah modernisasi pada tingkat sistem sosial.

b. Pendapat Kleinjans

Pembangunan pada akhirnya bukanlah soal teknologi atau GNP (*Gross National Product*), tetapi pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran baru, perluasan wawasan manusia, meningkatnya semangat kemanusiaan, dan suntikan kepercayaan diri.

c. Pendapat Rogers

Pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan material (termasuk bertambah besarnya keadilan, kebebasan, dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

d. Pendapat Todaro

Todaro menyatakan bahwa pembangunan secara tradisional mengandung pengertian kapasitas perekonomian nasional, yang kondisi perekonomian awalnya kurang lebih berada dalam keadaan statis untuk jangka waktu yang lama, untuk menghasilkan dan mempertahankan tingkat kenaikan produk nasional kotor (PNK) sekitar 5%-7% setahun. Selanjutnya Todaro menekankan pentingnya pembangunan pada Negara-negara berkembang karena kondisinya sangat memprihatinkan, terutama kemiskinan dan ketidakberdayaan. Todaro juga mengatakan bahwa pembangunan merupakan suatu perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan.

e. Menurut Haryono

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi masyarakat, dan dilakukan dengan norma-norma atau nilai-nilai tertentu.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh dan dari sudut pandang yang berbeda-beda dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah kegiatan perubahan yang direncanakan, untuk meningkatkan taraf hidup manusia baik dalam segi sosial maupun ekonomi.

## 2. Konsep-konsep Pembangunan

Konsep pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Beberapa konsep-konsep pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Konsep Pembangunan yang Berorientasi pada Pertumbuhan (Pertumbuhan Ekonomi)

Konsep pembangunan dengan sudut pandang ekonomi dimulai pada abad ke 18. Konsep pembangunan ini dinamakan dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith dalam Ginandjar Kartasmita adalah proses pertumbuhan dimulai apabila perekonomian mampu melakukan pembagian kerja (*division of labor*).

Konsep pembangunan ini yang mengutamakan bidang ekonomi tidak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, karena dalam “tiga dasawarsa (1940-1970) menunjukkan bahwa yang terjadi adalah rakyat dilapiskan bahwa tidak senantiasa menikmati cucuran hasil pembangunan yang seperti diharapkan itu”.<sup>20</sup>

b. Konsep Pembangunan Kebutuhan Dasar/Kesejahteraan (Kebutuhan Dasar)

Konsep kebutuhan dasar manusia atau *basic human needs* ini lahir dan berkembang sekitar tahun 1981. Strategi dari konsep ini adalah dengan menyediakan *publicservice* dan juga jaminan bagi masyarakat

<sup>19</sup> Redatin Parwadi, *Sosiologi Pembangunan* (Jakarta: Untan Press, 2013), 37-39.

<sup>20</sup> Ginandjar Kartasmita, *Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat* (Surabaya: t.p.,1997), 5.

miskin agar dapat menikmati layanan tersebut. Konsep ini berpandangan perlu adanya pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan oleh Negara atau bangsa dan tidak hanya memperhatikan tujuan sosial ekonomi.

c. Konsep Pembangunan yang Berpusat pada Manusia

Konsep yang terakhir adalah konsep pembangunan manusia. Tujuan utama dari konsep ini adalah “menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakatnya untuk menikmati kehidupan yang kreatif, sehat dan berumur panjang.”<sup>21</sup> Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tak dapat muncul begitu saja, dan pertumbuhan produksi serta pendapatan menurut pandangan ini adalah hanya sebuah alat yang menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya dari pembangunan, tentu pembangunan manusianya sendiri.

Jadi dalam konsep pembangunan selama ini terdiri dari tiga pandangan yaitu pandangan pembangunan dari pertumbuhan ekonomi, kebutuhan dasar dan pembangunan yang berpusat pada manusia.

### 3. Tujuan Pembangunan

Menurut Todaro ada tiga tujuan pembangunan yang harus dimiliki oleh masyarakat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan.
- b. Peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan.
- c. Perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan, yang tidak hanya membebaskan mereka dari kungkungan sikap menghamba dan perasaan bergantung kepada

---

<sup>21</sup> Ginandjar Kartasmita, Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat (Surabaya: t.p., 1997), 8.

orang dan Negara-negara lain tetapi juga dari berbagai faktor yang menyebabkan kebodohan dan kesengsaraan.<sup>22</sup>

#### 4. Dampak Positif dan Negatif

Kegiatan pembangunan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak berkelanjutan menurut Emil Salim, yaitu:

a. Dampak positif dari pembangunan yaitu:

1) Meningkatkan kualitas hidup

Menurut Nofitri WHO “kualitas hidup sebagai persepsi individu mengenai posisi mereka dalam kehidupan dilihat dari konteks budaya dan sistem di mana mereka tinggal serta hubungannya dengan tujuan, harapan, standar, hal-hal lain yang menjadi perhatian individu”.<sup>23</sup> Dengan adanya pembangunan maka kualitas yang dimiliki mereka dapat lebih meningkat karena adanya pembangunan. Contohnya ketika masyarakat yang ada di pedesaan dahulu sulit untuk pergi ke kota tetapi setelah adanya pembangunan seperti jalan tol atau jalan raya maka masyarakat di pedesaan dapat pergi ke kota dengan lebih mudah.

2) Turunnya angka kematian

Menurut badan pusat statistik, kematian adalah “keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Jadi dengan adanya pembangunan, dampak positif yang dirasakan adalah menurunnya angka kematian karena sarana dan prasarana dari adanya pembangunan. Seperti pembangunan rumah sakit dan pembangunan tempat pembuangan sampah sehingga lingkungan menjadi lebih bersih.

---

<sup>22</sup> Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 27

<sup>23</sup> Nofitri, *Gambaran Kualitas Hidup Penduduk Dewasa pada Lima Wilayah Jakarta*, Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2009), 11.

### 3) Meningkatkan kesejahteraan

Menurut Astriana Widyastuti pengertian kesejahteraan adalah “kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur dalam keadaan sehat, dan damai sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya”.<sup>24</sup> Seperti halnya meningkatkan kualitas hidup, maka dampak positif dari adanya pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan yang dirasakan oleh manusia karena sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat tersedia.

#### b. Dampak negatif dari pembangunan yaitu:

##### 1) Berkurangnya sumber daya

Sumber daya yang berkurang dimaksud adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terkandung atau terdapat di alam. Dampak dari adanya pembangunan diantaranya adalah sumber daya berkurang karena dalam setiap pembangunan pasti akan ada daerah yang digusur atau terbongkar. Seperti penebangan hutan untuk pembangunan jalan.

##### 2) Pencemaran lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuknya limbah hasil kegiatan manusia ke dalam suatu wilayah tertentu sehingga kualitas lingkungan wilayah tersebut menjadi berubah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. Dengan adanya pembangunan bisa terjadi pencemaran lingkungan dari hasil pembangunan yang dilakukan. Seperti contoh pembangunan jalan yang dapat mengakibatkan polusi udara karena debu dari hasil perataan jalan dan polusi suara karena kersanya suara mesin-mesin dalam membuat jalan yang membuat masyarakat sekitarnya terganggu.

---

<sup>24</sup> Sugiharsono, dkk., *Ilmu Pengetahuan Sosial kelas VIII Edisi 4* (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 39.

## 5. Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Peran Pemerintah dalam pembangunan menurut Siagian aparatur pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran aparatur pemerintah yang diantaranya adalah sebagai stabilisator, katalisator, modernisator, kepeloporan dan orientasi kerja. Kegiatan pembangunan tertentu. Untuk lebih rinci penjelasan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah stabilitas mutlak perlu terpelihara dalam kehidupan suatu Negara bangsa. Tanpa adanya stabilitas, keamanan, ketertiban, kerukunan akan terganggu. Bahkan kegiatan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat akan tidak berhasil.
- b. Katalisator, aparatur pemerintah harus mampu berperan memperlancar terjadinya perubahan yang akan membawa dampak positif di samping secara dini mampu mendeteksi perubahan yang akan berdampak negatif serta akan mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan.
- c. Mordenisator, melalui pembangunan, setiap Negara ingin menjadi Negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh Negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki niat tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
- d. Kepeloporan, selaku pelopor aparatur pemerintah dapat memainkan peranan penting dalam memperkenalkan dan membantu masyarakat menerapkan cara-cara kerja baru tersebut, misalnya melalui penyuluhan, penerangan, percontohan dan lain sebagainya. Aparatur

pemerintah akan mampu memainkan peranan tersebut apabila dikalangan mereka sendiri terdapat jiwa kepeloporan.

- e. Orientasi kerja, apapun yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah, kesemuanya harus dikaitkan dengan dan diarahkan kepada tercapainya tujuan Negara yang bersangkutan. Telah umum diketahui bahwa tujuan akhir suatu Negara jangkauan waktunya jauh kedepan dan sifatnya pun relatif tidak terbatas. Pada hal sarana dan prasarana, tenaga dan kemampuan untuk mencapai tujuan tersebut selalu terbatas, oleh karena itu orientasi kerja yang tepat dianut oleh aparaturnya pemerintah adalah efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja.<sup>25</sup>

Peran pemerintah Indonesia dalam pembangunan pun tercantum dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pada pasal 1 ayat 2 “Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”.<sup>26</sup> Tahun 2007 pemerintah mengeluarkan kelanjutan dari program pembangunan nasional tersebut yang tertulis pada UU Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. “RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan Visi, Misi dan Program Presiden”.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Sondang P Siagian, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi* (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2001), 135-142.

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2 Tersedia dari situs <http://bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/undang-undang/uu-no25-tahun-2004-tentang-sistem-perencanaan-pembangunan-nasional-sppn/> diakses pada 23 Oktober 2018 pukul 07.15 WIB.

<sup>27</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Jadi kesimpulan dari Undang-Undang tersebut menurut saya adalah bahwa rencana pembangunan jangka panjang nasional tersebut merupakan kelanjutan atau sebagai penjabaran dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Infrastruktur Jalan**

### **1. Devinisi Infrastruktur Jalan**

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan ekonomi, sosial dan keagamaan bukan hanya diperkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan. Melalui proyek, sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu juga, infrastruktur sebagai salah satu kelancaran dalam suatu barang, uang dan informasi dari satu pasar kepasar lainnya. Kondisi ini akan memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah sehingga bisa dibeli oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang penghasilannya lebih rendah, jadi perputaran jasa, manusia, uang, dan informasi turut menentukan pergerakan harga di pasar-pasar. Dengan kata lain, bahwa infrastruktur jalan menetralsisir harga-harga barang dan jasa antar daerah (antar kota dan kampung-kampung).<sup>28</sup>

Infrastruktur jalan merupakan faktor penting untuk mendukung pembangunan terutama di negara-negara berkembang. Dan pemerintah mempunyai peranan penting dalam menyediakan investasi untuk pembangunan infrastruktur. Seperti yang diketahui jalan merupakan infrastruktur umum maka keterlibatan dan intervensi pemerintah sangat diperlukan sehingga memberikan hasil yang optimal untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Hal lain yang menjadi perhatian dalam beberapa penelitian sebelumnya adalah jalan memberikan dampak sampai dengan beberapa tahun setelah pembangunan tersebut atau dalam jangka panjang.

---

<sup>28</sup> Hermanto, H., Meiyani, E., & Risfaisal, R. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Layang A.P Pettarani Di Kota Makassar. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 7(1), 198–205. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v7i1.2620>.

Ketersediaan infrastruktur di negara-negara berkembang masih jauh dari kebutuhan. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur jalan lebih banyak berfokus di Pulau Jawa dan tidak terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan kondisi ini maka terdapat hipotesis adanya perbedaan pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya menjadikan adanya tuntutan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Jika hal ini terpenuhi maka akan mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia lebih tinggi lagi dan mempercepat proses pembangunan.

## **2. Jalan sebagai *Public Service***

Suksesnya *Via Appia* menjadi faktor kemenangan Romawi dalam pertempuran menyiratkan bahwa jalan dengan kualitas baik dapat meningkatkan produktivitas, utamanya adalah kelancaran dan kemudahan logistik. Dengan begitu, harga barang dapat lebih murah karena biaya distribusi dapat ditekan dengan mempercepat mobilisasi, berimplikasi pada peningkatan ekonomi. Tentunya jalan yang dimaksud adalah jalan dengan kualitas sesuai dengan standar yang ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan penggunaan jalan.

Jalan sebagai layanan publik tidak terbatas pada manfaat peningkatan kecepatan mobilisasi pengguna, namun juga dengan kenyamanan dan aksesibilitas. Semakin baik kualitas jalan, semakin tinggi kenyamanan yang didapat pengguna. Semakin luas jaringan jalan, aksesibilitas masyarakat ke tempat tertentu semakin tinggi. Maka dari itu, kajian kebutuhan dan riset mengenai kualitas jalan sangat perlu dilakukan.

## **3. Manfaat Jalan Bagi Pertumbuhan Ekonomi**

Selain yang telah disebutkan di atas, manfaat jalan dapat kita tilik dari sisi ekonomi dan sisi sosial. Adler (1983) dalam Evaluasi Ekonomi Proyek-Proyek Pengangkutan menyatakan bahwa ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi ketika pembangunan pengangkutan dianggap telah

meningkatkan pembangunan ekonomi: pembangunan ekonomi tidak akan terjadi sama sekali jika tidak ada pembangunan pengangkutan dan sumber daya yang digunakan pembangunan baru memiliki potensi tidak dapat diutilisasi atau berkurang produktivitasnya apabila tidak ada perbaikan pengangkutan. Dalam hal ini, jalan sebagai salah satu sarana pengangkutan memegang peran penting dalam membangun ekonomi.

Lebih lanjut, dapat kita telusuri lebih jauh beberapa manfaat dari pembangunan pengangkutan atau transportasi berupa jalan, mencakup manfaat sosial di dalamnya:

- a. Mereduksi biaya eksploitasi sumber daya
- b. Meningkatkan pembangunan ekonomi
- c. Memangkas waktu perjalanan angkutan barang dan penumpang sehingga,
- d. Meminimalkan potensi kecelakaan dan kerusakan
- e. Kenyamanan dan perasaan aman yang meningkat dari masyarakat.

Dampak tidak langsung lainnya dari adanya pembangunan jalan adalah meningkatnya produktivitas masyarakat di lokasi awal dan akhir karena waktu tempuh yang berkurang serta meningkatnya potensi investasi di daerah yang terkoneksi. Selain itu lapangan kerja yang muncul ketika pembangunan jalan dan kesempatan untuk memperkuat kesatuan nasional juga menjadi salah satu manfaat yang timbul. Namun, perlu diperhatikan beberapa hal yang timbul disamping manfaat yang ada misalnya terdapat kerusakan lingkungan dan isu sosial lain.

#### **4. Jenis-jenis Jalan**

Jalan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa parameter berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Berdasarkan fungsinya, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Jalan terbagi ke dalam empat kelompok:

- a. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama yang memiliki karakteristik perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

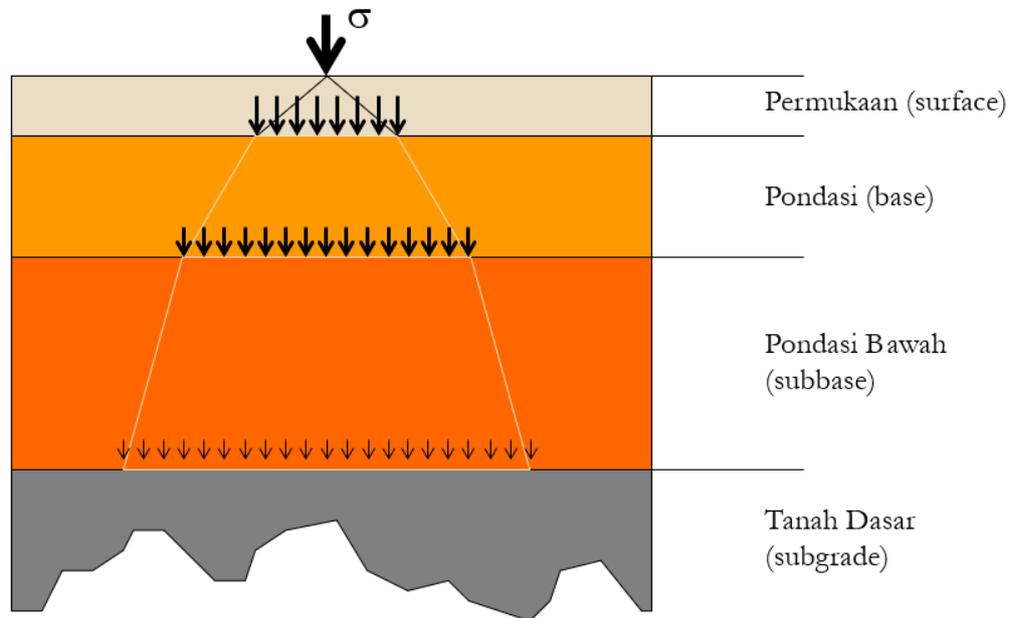
- b. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan karakteristik perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
- c. Jalan lokal merupakan jalan umum dengan fungsi melayani angkutan setempat yang memiliki karakteristik perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
- d. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Ketika menggunakan jalan, kita dapat menemui berbagai ragam jenis jalan yang dapat diidentifikasi secara visual, khususnya terkait komponen atau bahan yang digunakan untuk membuat jalan tersebut. Secara umum, berdasarkan bahan (perkerasan) yang digunakan jalan modern terbagi menjadi dua, yakni jalan dengan perkerasan rigid (beton) dan jalan dengan perkerasan lentur (aspal). Jenis jalan lain yaitu jalan tanah dan *paving block*.

Sebelum masuk lebih dalam mengenai jenis perkerasan jalan, mari mengenal struktur jalan secara umum. Jalan memiliki empat lapis struktur, yakni *subgrade*, *subbase*, *base*, dan *surface*. Jenis lapisan terakhir yang akan menjadi jenis perkerasan. *Subgrade* merupakan lapisan paling bawah yang menjadi dasara struktur. Kemudian ada *subbase* yang menjadi pondasi bawah yang kemudian akan dilapisi dengan pondasi. *Surface* akan melengkapi struktur jalan sebagai penutup jalan.

Keempat lapis struktur ini berfungsi untuk membagi tegangan yang didapat dari beban lalu lintas, dimana pada titik pertemuan antara ban/roda garis tegangan berupa titik yaitu pada *surface* dan merupakan posisi dimana dampak dari beban lalu lintas pada kondisi maksimal. Tegangan akan didistribusikan ke bawah dan garis tegangan akan semakin melebar. Maka dari itu, jenis perkerasan (*surface*) perlu diperhatikan sesuai dengan rencana kendaraan yang akan melewati jalan tersebut karena pada

hakikatnya tegangan pada *surface* memiliki nilai paling besar (area kontak paling kecil).



Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, lapisan *surface* atau selanjutnya akan kita sebut dengan perkerasan terbagi menjadi dua, yakni perkerasan rigid dan lentur . Setiap perkerasan memiliki fungsi, kelebihan, dan kekurangan masing-masing.

#### 1) Beton

Memiliki komposisi plat beton semen sebagai lapis pondasi dan lapis pondasi bawah di atas *subgrade*. Memiliki modulus elastisitas - sebuah unit untuk mengukur ketahanan bahan ketika mengalami deformasi elastis saat ada gaya yang bekerja pada permukaan bahan- yang tinggi, beton memiliki perawatan yang lebih murah dibandingkan dengan jalan aspal. Pada perkerasan ini, *engineer* juga dapat merencanakan jalur keretakan yang dapat timbul di kemudian hari, sehingga retak yang terjadi tidak sampai pada tahap fatal. Direkomendasikan untuk *subgrade* yang memiliki kualitas kurang baik.

Selain kelebihan yang dimiliki perkerasan rigid, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jenis perkerasan ini secara umum lebih cepat membuat ban kendaraan aus dan juga sensasi yang kurang nyaman bagi sebagian orang. Kemudian ketika melakukan perbaikan, terkadang hanya dilakukan penambahan elevasi terhadap perkerasan yang lama. Distribusi tegangan pada perkerasan rigid menyebabkan ketebalan yang diperlukan untuk menggunakan perkerasan ini cukup tinggi, terutama bila beban rencana cukup besar.

## 2) Aspal

Perkerasan lentur/fleksibel menggunakan bahan pengikat aspal panas dengan beberapa jenis campuran yang umum digunakan di Indonesia, salah satunya *Hot Mix*. Penggunaan perkerasan aspal relatif lebih mahal, namun memiliki beberapa kelebihan seperti kondisi jalan yang lebih halus dan minim gelombang, sensasi berkendara yang lebih nyaman, dan perawatan yang mudah (bukan murah). Selain kelebihan yang dimiliki, terdapat kekurangan seperti kurangnya ketahanan air sehingga diperlukan perencanaan drainase yang baik.

## 5. Biaya Pembangunan Jalan

Membangun sebuah infrastruktur khususnya yang membutuhkan lahan yang luas/panjang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan komponen biaya yang beragam. Seperti pembangunan infrastruktur pada umumnya, biaya-biaya yang muncul dalam sebuah konstruksi antara lain biaya pengadaan lahan, biaya perencanaan, biaya konstruksi, dan biaya pemeliharaan dimana untuk tiga komponen pertama masuk ke dalam *Capital Expenditure (CAPEX)* dan komponen terakhir disebut dengan *Operational Expenditure (OPEX)*.

Pembebasan lahan menjadi salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam sebuah proyek karena berpotensi menghabiskan biaya cukup besar, khususnya proyek jalan. Kita ambil sebuah contoh pembangunan jalan luar kota tipe 4/2 D sebagai penghubung utama dua kota yang sedang berkembang dengan panjang 10 Km. Berdasarkan

Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) pembangunan jalan laur kota dengan tipe 4/2 D membutuhkan setidaknya lebar jalur lalu-lintas  $2 \times 7,0$  m dengan lebar efektif bahu 2,0 m pada masing – masing sisi (sisi dalam maupun sisi luar jalur). Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap meter panjang jalan yang dibangun, dibutuhkan setidaknya luas lahan sebesar  $22\text{m}^2$  dan (belum termasuk median). Sehingga dapat kita perkirakan berapa luas lahan yang dibutuhkan untuk membangun jalan tersebut, yakni setidaknya seluas  $220.000\text{m}^2$  (hanya konstruksi jalan) dan belum memperhitungkan lahan untuk ruang milik jalan maupun lahan efektif untuk pembangunan (seperti penyimpanan alat berat atau pembangunan *concrete plant* apabila dibutuhkan). Dengan tren harga tanah yang semakin meningkat tiap tahunnya, pembebasan lahan dalam proyek jalan menjadi isu yang perlu dimitigasi sejak dini, terutama dengan adanya risiko penolakan dalam kasus trase melewati pemukiman.

Komponen selanjutnya adalah biaya perencanaan jalan. Biaya ini meliputi beberapa kegiatan seperti survey tanah, survey arus lalu lintas, analisis terhadap bangkitan dan tarikan suatu daerah, juga biaya manajemen konstruksi. Biaya komponen ini pada umumnya merupakan porsi biaya paling kecil di antara komponen biaya lainnya.

Biaya pembangunan fisik menjadi komponen mayoritas dalam struktur biaya sebuah proyek jalan. Banyak faktor yang memengaruhi biaya pembangunan fisik dan tentunya berkorelasi dengan perencanaan yang dilakukan. “Bagaimana bentuk jalan dan medan jalan yang dibangun. Kemudian ada beberapa variabel yang menjadi pengaruh biaya pembangunan jalan di antaranya lebar jalan, jenis konstruksi, medan pembangunan hingga fasilitas pendukung jalan seperti adanya pembangunan flyover atau underpass akan memengaruhi biaya pembangunan fisik”, ujar Danis H. Sumadilaga, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Sebagai gambaran, pembangunan jalan dengan lebar 2

sampai 3 meter menelan biaya antara Rp10-30 Miliar per kilometer (km) di luar biaya pembebasan lahan.

Setiap jalan akan didesain dengan kebutuhan dan standar yang telah ditentukan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kualitas jalan akan mengalami degradasi karena beban lalu lintas yang diterima jalan, terlebih jika ada kendaraan dengan tonase melebihi standar melewati jalan tersebut. Selain beban lalu lintas, jalan dihadapkan dengan kondisi alam seperti cuaca, temperatur, kelembapan, dan lain-lain, tak terkecuali bencana alam dalam kasus ekstrem. Maka dari itu, dibutuhkan pemeliharaan jalan setelah konstruksi selesai dan jalan dipakai oleh pengguna. Pada dasarnya fungsi pemeliharaan ini adalah untuk mempertahankan kondisi jalan agar berfungsi optimal dalam melayani lalu lintas untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan meningkatnya pelayanan jalan. Biaya pemeliharaan jalan terbagi menjadi tiga jenis:

a. Pemeliharaan Rutin (*Routine Maintenance*)

Dilakukan secara berkala sepanjang tahun yang meliputi perawatan permukaan jalan antara perbaikan kerusakan kecil, penambalan lubang, pemburasan, perbaikan kerusakan tepi perkerasan; perawatan trotoar; saluran samping dan drainase; bangunan pelengkap jalan serta perlengkapan jalan; dan perawatan bahu jalan.

b. Pemeliharaan Berkala (*Periodic Maintenance*)

Pemeliharaan dilakukan pada interval waktu tertentu karena kondisi jalan mulai menurun yang meliputi perbaikan, *levelling*, *resealing* dan *overlay* (pelapisan ulang) pada jalan dengan perkerasan aspal atau *regrooving* (pengaluran/pengkasaran permukaan) maupun *overlay* pada jalan dengan perkerasan beton.

c. Rehabilitasi (*Urgent Maintenance*)

Dilakukan untuk kondisi yang sifatnya mendadak/mendesak/darurat akibat terjadi kerusakan setempat yang cukup berat misalnya jalan putus akibat banjir, longsor, gempa, dan lain-lain. Rehabilitasi ini

meliputi semua kegiatan pengembalian kondisi jalan ke kondisi semula yang perlu dosegerakan agar lalu lintas tetap berjalan dengan baik.



## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.<sup>29</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu.<sup>30</sup>

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada sifat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Kemudian untuk pengambilan sample sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>31</sup>

Tujuan penelitian kualitatif dalam tulisan ini adalah untuk menyelidiki suatu fakta dan kemudian memberikan penjelasan atas berbagai realitas yang ditemukan. Penulis memiliki akses langsung ke prosedur pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lumbir Kecamatan Kabupaten Banyumas dalam kaitannya dengan pemerataan pembangunan.

### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas sebagai lokasi penelitian. Adapun yang menjadi

---

<sup>29</sup> Amirul Hadi & Haryono, "Metodologi Penelitian Pendidikan", (Bandung:Pustaka Setia, 1998), hlm.51

<sup>30</sup> Wina Sanjaya, "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, R & D", (Jakarta:Kencana Prenada, 2013), hlm.59

<sup>31</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R & D", (Bandung:Alfabeta, 2010), hlm.9

pertimbangan penulis melakukan penelitian di desa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas merupakan salah satu Desa di Kabupaten Banyumas yang memiliki sumber daya alam yang melimpah yaitu dengan mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Lumbir bergerak dibidang pertanian.
2. Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas memiliki permasalahan dalam bidang pembangunan infrastruktur yaitu masih adanya kondisi jalan yang rusak, sehingga mengharuskan dibangunnya sarana infrastruktur fisik untuk mempermudah akses jalan desa, dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatannya.

### **C. Sumber Data**

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung yang berasal dari sumber pertama atau lokasi objek penelitian yang dilakukan.<sup>32</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu Suwarjo selaku Kepala Desa, Karso selaku Sekertaris Desa, Evi Lismawati selaku Kaur Perencanaan, Daryono selaku Kasi Kesejahteraan, Junarto selaku Kadus I, Hartoyo selaku Kadus II, Piliyanto selaku Kadus III di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya.<sup>33</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari narasumber yang bersangkutan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan

---

<sup>32</sup> Shofia Siregar, "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan" (Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm.16

<sup>33</sup> Shofia Siregar, "Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan" (Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm.16

pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

##### **1. Subyek Penelitian**

Subyek narasumber atau sumber utama yang bisa memberikan informasi-informasi utama atau data yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>34</sup> Subjek dalam penelitian kualitatif disebut informan. Pada penelitian ini, subjek yang dijadikan sumber data adalah sebagai berikut:

- a. Suwarjo selaku Kepala Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, untuk memperoleh data tentang pemerataan pembangunan infrastruktur jalan desa
- b. Karso selaku sekertaris Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, untuk memperoleh data tentang pemerataan pembangunan infrastruktur jalan desa
- c. Evi Lismawati selaku Kaur Perencanaan Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, untuk memperoleh penguatan data tentang pemerataan pembangunan infrastruktur jalan desa
- d. Daryono selaku Kasi Kesejahteraan Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, untuk memperoleh penguatan data tentang pemerataan pembangunan infrastruktur jalan desa
- e. Junarto selaku Kadus I Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, untuk memperoleh bukti dan bentuk tentang pemerataan pembangunan infrastruktur jalan desa
- f. Hartoyo selaku Kadus II Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, untuk memperoleh bukti dan bentuk tentang pemerataan pembangunan infrastruktur jalan desa
- g. Piliyanto selaku Kadus III Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, untuk memperoleh bukti dan bentuk tentang pemerataan pembangunan infrastruktur jalan desa

---

<sup>34</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D".....,hlm.50

h. Sulito selaku ketua RW 02 Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, untuk memperoleh bukti dan bentuk tentang pemerataan pembangunan infrastruktur jalan desa

## 2. Obyek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu atribut dari orang atau kegiatan yang mempunyai variasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>35</sup> Objek dari penelitian ini adalah pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu diantaranya:

### 1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperlihatkan dan mengikuti. Secara istilah observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur. Tujuan observasi yang ingin dicapai adalah mendeskripsikan lingkungan (*site*) yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat tersebut.<sup>36</sup>

Metode observasi ini diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di lokasi peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang sedang diteliti

<sup>35</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D".....,hlm.13

<sup>36</sup> Haris Herdiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial", (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm.133-134

biasa disebut observasi langsung.<sup>37</sup> Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.<sup>38</sup>

Adapun yang akan peneliti observasi nantinya adalah pemerataan pembangunan infrastruktur desa dalam meningkatkan aksesibility warga di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan tewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Seperti ditegaskan oleh Licoln dan Guba, antara lain: mengontruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

Merekonstruksi hal yang demikian sebagai yang dialami masa lalu, memproyeksikan hal sesuatu sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (*triangulasi*), dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.<sup>39</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada jenis teknik wawancara, khususnya wawancara mendalam (*deep interview*). Guba dan Licoln menyatakan bahwa teknik ini memang merupakan teknik pengumpulan data yang khas bagi penelitian kualitatif. Senada dengan pendapat Patton bahwa cara utama yang dilakukan oleh para ahli metodologi kualitatif untuk

---

<sup>37</sup> Amirul Hadi 7 Haryono, "Metodologi Penelitian Pendidikan", (Bandung:Pustaka Setia, 1998), hlm.129

<sup>38</sup> Sugiyono, "Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D", hlm.145

<sup>39</sup> Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.186

memahami persepsi, perasaan dan pengetahuan orang-orang adalah wawancara mendalam dan intensif.

Oleh karena itu wawancara mendalam merupakan teknik utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Buku *Research Interviewing: Context and Narrative*, Eliot Mishler memperjelas perbedaan antara suatu wawancara peneliti kualitatif dan bentuk-bentuk standar wawancara lainnya. Pada intinya, wawancara adalah suatu bentuk dari wacana. Gambaran-gambaran khususnya mencerminkan struktur dan tujuan wawancara yang berbeda, yaitu wacana dibuat dan diorganisasi dengan menyatakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan.

Suatu wawancara adalah suatu produk bersama (*joint product*) tentang apa yang dibicarakan satu sama lain. Catatan sebuah wawancara yang peneliti buat dan kemudian digunakan didalam pekerjaan analisis dan interpretasi adalah sebuah penggambaran atau responden dari percakapan tersebut. Tujuan penelitian kualitatif bentuk yang bisa diambil oleh wawancara telah digambarkan dengan berbagai cara. Secara umum pada sebagian besar deskripsi adalah suatu kontinum dari format wawancara berkisar dari format terstruktur hingga suatu format yang relatif tidak terstruktur.

Struktur dari wawancara berkenan dengan ukuran dimana pertanyaan yang diajukan kepada responden dikembangkan terlebih dahulu sebelum wawancara. Format wawancara berbeda dalam tingkat keterampilan yang diperlukan dari peneliti untuk melaksanakan percakapan di sekitar tujuannya. Masing-masing format memberikan suatu kelaziman kritis. Pertanyaan-pertanyaan terbuka dan dirancang untuk menyatakan apa yang penting untuk memahami tentang fenomena yang dikaji.<sup>40</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan bentuk wawancara secara langsung tatap muka untuk mendapatkan informasi atau sumber data yang mendukung penelitian penulis. Informasi maupun data tersebut penulis

---

<sup>40</sup> Drs. Rulam Ahmad, M.Pd, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm.119

peroleh dari wawancara kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Perencanaan, Kasi Kesejahteraan, Kadus I, Kadus II, Kadus III, dan tokoh masyarakat di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Pedoman wawancara yang hanya digunakan hanya garis besar permasalahan yang akan ditanyakan sehingga narasumber lebih banyak menjelaskan berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti. Berdasarkan hal tersebut peneliti banyak memperoleh informasi berkaitan dengan pemerataan pembangunan infrastruktur desa dalam meningkatkan aksesibility warga melalui wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “*dokumen*” yang artinya barang-barang tertulis. Studi dokumentasi adalah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang yang sudah dijalani.<sup>41</sup>

Adapun dokumen yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan gambaran jelas tentang pembangunan infrastruktur jalan desa. Data-data tersebut meliputi catatan-catatan penting, latar belakang, letak geografis dan gambar Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mencari, menyusun dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta data-data lain yang secara sistematis, sehingga mudah dipahami, dimengerti dan bermanfaat bagi orang lain.

Menurut Bogdan dan Biklen mengungkapkan bahwa analisis data adalah suatu kegiatan yang menyelidiki dan mengatur secara sistematis pengolahan data yang meliputi teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang bertujuan untuk mengolah pemahaman peneliti dan mengolah data yang akan dipresentasikan kepada orang lain yang meliputi mengerjakan data,

---

<sup>41</sup> Haris Herdiansyah, “Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial”, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm.11

mengorganisasikan, mencari model dan memilih suatu hal penting yang akan dipelajari serta memutuskan hal yang akan di laporkan.<sup>42</sup>

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dalam data yang diperoleh di lapangan cukup banyak sehingga perlu adanya catatan secara teliti dan rinci, apabila semakin banyak maka akan semakin rumit. Reduksi data sendiri adalah teknik merangkum, memilih kata yang penting dan sekiranya membuang kata yang tidak penting.

Teknik reduksi data secara langsung tatap muka. Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, semua catatan di baca dipahami dan dibuat ringkasan kontak yang berisi hasil penelitian terhadap catatan secara langsung, memfokuskan dan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, yaitu pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, bentuk penyajian data kualitatif menurut Milles and Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono yaitu *“the most frequent form of display for qualitative research data in the past has been narrative text”*. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif jadi dalam penyajian data berisi uraian singkat dan menggunakan teks yang bersifat deskriptif dan naratif. Berdasarkan hal tersebut maka akan memudahkan pembaca dalam memahami atau memahami gambaran suatu kegiatan penerapan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

---

<sup>42</sup> Dr. Drs. Rulam Ahmad, M.Pd, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2020), hlm. 230

### 3. *Conclusion Drawing/Verification/Kesimpulan*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada.

Kegiatan analisis berikutnya adalah menarik kesimpulan dan *verifikasi*. Metode ini penulis gunakan untuk mengambil kesimpulan dan *verifikasi* dari informasi yang diperoleh secara langsung dalam pemerataan pembangunan infrastruktur desa dalam meningkatkan aksesibility warga. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali observasi untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibilitas.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak. Karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian secara langsung tatap muka.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Lumbir**

##### **1. Profil Desa Lumbir**

Desa Lumbir adalah Desa di Kecamatan Lumbir yang merupakan Ibu Kota Kecamatan yang dilewati oleh 3 Jalan Nasional yang menghubungkan antara Jawa Barat-Jawa Tengah-Yogyakarta, serta jalan alternatif Ajibarang-Gumelar-Gumelar Lumbir. Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Bayumas memiliki koordinat bujur X=676994,55865 dan koordinat lintang Y=138968,0471. Secara administratif Desa Lumbir termasuk desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Lumbir yang terletak di ujung barat Kabupaten Banyumas.

Sebagai Desa yang terletak di Ibu Kota Kecamatan, merupakan keuntungan besar bagi masyarakat Desa Lumbir dalam memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Karena hampir semua fasilitas pemerintahan berada di Desa Lumbir. Dengan demikian masyarakat tidak perlu repot-repot apabila akan mengurus surat-surat yang berhubungan dengan instansi-instansi tertentu.

Desa Lumbir terdiri dari 3 (tiga) Wilayah Kadus, yang terdiri dari 8 Rukun Warga (RW) dan 60 Rukun Tetangga (RT), yaitu:

- 1) Kadus I terdiri dari 3 Wilayah Rukun Warga/Rw, yaitu :
  - a) RW I Grumbul Lumbir terdiri dari 10 RT
  - b) RW II Grumbul Cikadu terdiri dari 6 RT
  - c) RW III Grumbul Pangawaren terdiri dari 5 RT
- 2) Kadus II terdiri dari 2 Wilayah Rukun Warga/RW, yaitu:
  - a) RW IV Grumbul Butulan terdiri dari 10 RT
  - b) RW V Grumbul Ciwera terdiri dari 7 RT
- 3) Kadus III terdiri dari 3 Wilayah Rukun Warga/RW, yaitu:
  - a) RW VI Grumbul Kalisalak terdiri dari 9 RT
  - b) RW VII Grumbul Krapyak terdiri dari 5 RT

c) RW VIII Grumbul Cilombang terdiri dari 8 RT

Pentingnya memahami kondisi Desa untuk mengetahui keterkaitan perencanaan dengan muatan pendukung dan permasalahan yang ada, memberikan arti penting keputusan pembangunan sebagai langkah mendayagunakan dan penyelesaian masalah di masyarakat.

Desa Lumbir merupakan salah satu dari 10 desa di wilayah Kecamatan Lumbir, yang terletak 1 km ke arah Barat dari Ibu Kota Kecamatan Lumbir. Desa Lumbir mempunyai luas wilayah seluas 1.811,420 hektar. Adapun batas-batas wilayah desa Lumbir:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Dermaji (Kecamatan Lumbir) dan Wilayah Perum Perhutani
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karanggayam dan Desa Cidora (Kecamatan Lumbir)
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kedunggede (Kecamatan Lumbir) dan Wilayah Perum Perhutani
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kedunggede (Kecamatan Lumbir)

Iklm Desa Lumbir, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir. Desa Lumbir terdiri dari 4 dusun diantaranya Dusun I Lumbir-Butulan; Dusun II Kalisalak-Krapyak; Dusun III Cikadu-Pengawaren; Dusun IV Ciwera-Cilombang.

Sebagian wilayah Desa Lumbir memiliki topografi dataran rendah hingga rangkaian perbukitan disebelah utara yang sekaligus menjadi hulu sungai Cihaur. Desa Lumbir merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian berkisar 70-150m dari permukaan laut, sehingga tanah di Desa Lumbir sebagian besar dataran tinggi dan pegunungan. Suhu di Desa Lumbir masih dalam batas normal.

Luas Desa Lumbir adalah 1.811,420 ha. Dengan mayoritas penduduk sebagai petani, buruh tani, penderes kelapa dan lain-lain. Pola kepemilikan

tanah sangat tergantung dengan mata pencaharian itu sendiri. Lahan-lahan tersebut terbagi atas : tanah sawah seluas 297,716 ha, tanah tegalan seluas 900,065 ha, tanah pekarangan/pemukiman seluas 84,635 ha, hutan Negara 474,000 ha, dan sisanya 55 ha, untuk tempat pendidikan, sungai, jalan, lapangan dan makam dan lain-lain.

Desa Lumbir memiliki 10.893 jiwa penduduk dari 3.632 Kepala Keluarga (KK), terdiri dari 3.212 KK laki-laki dan 420 KK perempuan, yang terdiri dari 5.512 jiwa penduduk laki-laki dan 5.381 jiwa penduduk perempuan. Rata-rata setiap keluarga terdiri dari 3 s.d 4 anggota keluarga. Mata pencaharian masyarakat di Desa Lumbir sebagian besar adalah hidup sebagai petani. Jumlah keluarga yang hidup sebagai petani adalah 3.121, buruh harian lepas 408, buruh tani/pekebun 415.

## **2. Visi dan Misi Pemerintahan Desa Lumbir**

### **a. Visi:**

Desa Lumbir yang maju menuju masyarakat yang sejahtera, adil, aman dan berakhlak mulia.

### **b. Misi:**

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, demokratis, tepat, cepat dan bermanfaat dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertakwa kehadiran Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh sentra perekonomian rakyat terutama pertanian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), peternakan, perikanan, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan, infrastruktur serta sosial budaya yang memadai.
- 3) Memberdayakan Kelembagaan masyarakat sebagai subyek dan mitra pembangunan desa.

- 4) Mengembangkan Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan dengan mengimplementasikan paradigm masyarakat membangun.

### 3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa Lumbir

Sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Lumbir telah membuat beberapa Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, yang merupakan produk hukum Desa Lumbir dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan Kepala Desa.

Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

**Tabel: 4.1**  
**Daftar Nama-nama Perangkat Desa Lumbir**

No.	Nama	Jabatan
1	Suwarjo	Kepala Desa
2	Karso	Sekretaris Desa
3	Evi Lismawati	Kaur Perencanaan
4	Sarwin	Kaur Keuangan
5	Lilis Nurhayati	Kaur TU & Umum
6	Cariman	Kasi pemerintahan
7	Daryono	Kasi Kesejahteraan
8	Sartini	Kasi Pelayanan
9	Junarto	Kadus I
10	Hartoyo	Kadus II
11	Piliyanto	Kadus III
12	Bakir	Staf TU & Umum
13	Rido	Staf Pelayanan

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa Lumbir**

##### **a. Kepala Desa Lumbir**

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Adapun wewenang Kepala Desa yaitu:

- 1) Menyelenggarakan pemerintah Desa Lumbir berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- 2) Memajukan rancangan peraturan Desa Lumbir.
- 3) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Desa Lumbir mengenai APB Lumbir untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- 5) Membina kehidupan masyarakat Desa Lumbir.
- 6) Membina ekonomi Desa Lumbir.
- 7) Mengordinasi pembangunan Desa Lumbir secara partisipatif.
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **b. Sekretaris Desa Lumbir**

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan di bidang administrasi Desa. Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Sekretaris memiliki fungsi yaitu:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat Desa Lumbir, penyediaan prasarana perangkat Desa Lumbir dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventaris, pelayanan dinas, dan pelayanan umum.

- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Desa Lumbir, Perangkat Desa Lumbir, Bamus, dan Lembaga Pemerintahan Desa Lumbir lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa Lumbir, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- 5) Melaksanakan tugas lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas sesuai dengan ketentuan, petunjuk dan kebijaksanaan pimpinan.

**c. Staf/Kaur Perencanaan**

Staf/ kaur perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa Lumbir dalam urusan pelayan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Tugas staf/ kaur perencanaan:

- 1) Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- 2) Mengkoordinasi urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa Lumbir,
- 3) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi program,
- 5) Penyusunan laporan Kepala Desa/ penyelenggaraan pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat).

**d. Staf/Kaur Keuangan**

Kaur Keuangan atau Bendahara memiliki tugas untuk membantu Sekertaris Desa. Bendara Desa mengelola keuangan Desa yang meliputi penerimaan pendapatan dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Tugas pokok Bendahara yaitu:

- 1) Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar,
- 2) Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib,
- 3) Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban.

e. **Staf/Kaur Tata Usaha dan Umum**

Kaur Tata Usaha dan Umum bertugas membantu Sekertaris Desa Lumbir dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsiapan, pengelolaan inventaris kekayaan Desa Lumbir, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Adapun fungsi Kaur Tata Usaha dan Umum yaitu:

- 1) Adminstrasi surat menyurat
- 2) Penataan adminstrasi Perangkat Desa Lumbir
- 3) Penyediaan prasarana Perangkat Desa Lumbir
- 4) Penyiapan Rapat
- 5) Inventarisasi
- 6) Pelayanan umum
- 7) Menyusun APB Desa Lumbir
- 8) Monitoring dan Evaluasi Program

f. **Staf/Kaur Pelayanan**

Kaur Pelayanan bertugas membantu Sekertaris Desa Lumbir dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Tugas pokok Kaur Pelayanan yaitu:

- 1) Pengumpulan dan penyaluran bantuan-bantuan terhadap korban bencana dan penyandang masalah sosial
- 2) Pembinaan terhadap organisasi keagamaan
- 3) Pelaksanaan segala usaha dalam rangka meningkatkan peranan perempuan dan pemberdayaan perempuan
- 4) Monitoring dan pembinaan pelayana kesehatan masyarakat.

g. **Kaur/Staf Kesejahteraan**

Kaur Kesejahteraan memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, dan pemuda. Adapun fungsi Kaur Kesejahteraan yaitu:

- 1) Menyusun program dan langkah-langkah kerja bagian kesejahteraan rakyat
- 2) Pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial
- 3) Menyusun bahan kebijakan daerah dibidang keagamaan, pendidikan, pemuda dan olahraga, serta kesejahteraan sosial
- 4) Membuat rencana anggaran kegiatan bagian kesejahteraan rakyat
- 5) Mengevaluasi hasil kerja sub bagian sesuai dengan program langkah kerja yang telah ditentukan.

h. **Kadus/Kepala Dusun**

Kadus merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Tugas pokok Kadus:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dari pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
- 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**5. Deskripsi Informan**

- a. Suwarjo adalah seorang yang diberi amanah untuk menjabat sebagai Kepala Desa Lumbir, berumur 56 tahun, beliau bertempat di Rt.07 Rw.06 Grumbul Kalisalak Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

- b. Karso adalah seorang yang diberi amanah untuk menjabat sebagai Sekretaris Desa Lumbir, berumur 55 tahun, beliau beralamat di Rt.03 Rw.07 Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.
- c. Evi Lismawati adalah seorang yang diberi amanah untuk menjabat sebagai Kaur Perencanaan Desa Lumbir, berumur 45 tahun, beliau beralamat di Rt.05 Rw.01 Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.
- d. Daryono adalah seorang yang diberi amanah untuk menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan Desa Lumbir, berumur 50 tahun, beliau beralamat di Rt.06 Rw.06 Grumbul Kalisalak Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.
- e. Junarto adalah seorang yang diberi amanah untuk menjabat sebagai Kepala Dusun (I) Desa Lumbir, berumur 57 tahun, beliau beralamat di Rt.03 Rw.01 Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.
- f. Hartoyo adalah seorang yang diberi amanah untuk menjabat sebagai Kepala Dusun (II) Desa Lumbir, berumur 55 tahun, beliau beralamat di Rt.01 Rw.05 Grumbul Ciwera Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.
- g. Piliyanto adalah seorang yang diberi amanah untuk menjabat sebagai Kepala Dusun (III) Desa Lumbir, berumur 45 tahun, beliau beralamat di Rt.06 Rw.06 Grumbul Kalisalak Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.
- h. Sulito adalah seorang yang diberi amanah untuk menjabat sebagai Ketua RW 02 Desa Lumbir, berumur 60 tahun, beliau beralamat di Rt.01 Rw.02 Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

**B. Temuan Hasil Penelitian Pada Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas**

Selama melaksanakan penelitian lapangan, peneliti menemukan data dan informasi yang didapat di lapangan mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih satu bulan lebih dari tanggal 15

Januari sampai dengan tanggal 27 Februari 2023. Data yang diperoleh berdasarkan Upaya Pemerintah Desa Dalam Pemeratan Pembangunan Infrastruktur jalan itu sendiri yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dalam mengelola Dana Desa. Dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu:

### **1. Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin di capai di masa akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang di butuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi sangat penting karena perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa, diperlukan rencana tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut adalah cara menggunakan dan memanfaatkan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Perencanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan hasil dari perencanaan. Pada tahap perencanaan didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdes). Musrebang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintahan Desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.

Teori di atas menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan Dana Desa. Pertama pemerintah akan mengadakan musyawarah dengan masyarakat (Musrebang) untuk menampung usulan-usulan dari masyarakat mengenai program kerja yang akan di lakukan untuk tahun yang berkenan akan dilaksanakan dan pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Hal ini sesuai dengan hasil dari

wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Suwarjo selaku Kepala Desa yang mengatakan bahwa:

“Kita melaksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) dari masing-masing gerumbul tiap-tiap RT, kira-kira apa usulannya, Contoh dari 10 RT punya kepentingan punya usulan, nanti skala prioritas di RT tersebut apa kira-kira ya yang paling urgent yang paling dibutuhkan, setelah mungkin sudah ditentukan apa skala prioritasnya masing-masing grumbul tinggal dilaksanakan kegiatan Musyawarah Desa (Musdes)”<sup>43</sup>.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebelum program-program pembangunan direalisasikan atau dilaksanakan dari pemerintah Desa Lumbrir senantiasa mengundang seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Lumbrir ini untuk bersama-sama melakukan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang). Dalam musyawarah tersebut selaku pemerintah desa memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan menjadi program pembangunan di Desa Lumbrir yang akan direalisasikan. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Karso selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa:

“Kita mengedepankan fungsi dari jalan yang kita bangun, contoh seperti jalan pertanian, sepanjang ini hanya fokus ke pemukiman, setelah adanya pengalaman pembukaan jalan pertanian kita perlu mengembangkan, karena efek setelah dibangunnya jalan pertanian memudahkan meningkatkan hasil. Karena akses yang dipentingkan sekarang pertanian, kalo infrastruktur pemukiman hampir 90% sudah ada aksesnya”<sup>44</sup>.

Tanggapan narasumber diatas bahwa dalam pemerataan infrastruktur jelas berbeda-beda tergantung dari kepentingan atau kebutuhan pada masyarakat itu sendiri, misalnya masyarakat kota yang terfokus dalam perniagaan tentu yang dibangun atau diperbaiki adalah akses jalan dan lain sebagainya, sedangkan daerah yang masih menggunakan pertanian sebagai

---

<sup>43</sup> Wawancara Dengan Suwarjo Selaku Kepala Desa Lumbrir, Kecamatan Lumbrir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

<sup>44</sup> Wawancara Dengan Karso Selaku Sekretaris Desa Lumbrir, Kecamatan Lumbrir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

mata pencahariaannya tentu terfokus dalam pembangunan jalan tani atau bendungan sebagai penyuplai air yang dibutuhkan. Maka dari itu pembangunan yang merata harus diperhatikan sesuai dari kebutuhan yang diperlukan masyarakat.

Penulis terus menggali informasi dengan mewawancarai ibu Evi Lismawati (Kaur Perencanaan) mengatakan bahwa:

“Dalam pemerataan pembangunan, pemerintah desa hanya menampung usulan dari masyarakat yang berasal dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), jadi nanti masyarakat itu sendiri yang mengajukan kebutuhan apa infrastruktur apa yang dibutuhkan masyarakat, berarti pengajuan dari tingkat bawah terus nanti dimusyawarahkan di tingkat RW dulu, nah nanti hasil dari penggalian gagasan ada tim RKP (Rencana Kerja Pemerintah), kalau Tahun 2022 berarti tim RKP-nya 2021, 1 tahun sebelumnya. Jadi tim RKP itu nanti akan menggali gagasan. Kebetulan 2019-2022 ini kan kita kena covid-19 artinya kan tidak sebanyak yang sebelumnya. Jadi penggalian gagasan itu di mana tim dari desa menggali apa yang menjadi prioritas jadi nanti usulan dari desa itu akan diangkat menjadi sebuah forum Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Nah artinya dari tim itu nanti akan menampung seluruh usulan dan dari masing-masing RW itu sudah mengirimkan prioritas, jadi kami tidak bisa menggeser prioritas satu dua tiga dikirimkan ke desa dan akan menjadikan prioritas satu kalau memang terdandai, dua itu kan menjadi alternative”<sup>45</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak Daryono (Kasi Kesejahteraan) disaat wawancara yang penulis lakukan mengatakan bahwa:

“Mengalokasikan anggaran untuk masing-masing wilayah dari RW 1-8 sesuai kebutuhan mereka dengan rencana di wilayah yang diawali dari musyawarah di lingkungan RW (Musdus) dan usulan dibawa ke desa, dibahas bersama-sama dalam acara musrenbang untuk menentukan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) yang di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur. Tapi kembali sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat tetapi lebih dari itu ya mengikuti anggaran yang ada karena anggaran kan terbatas dan apalagi untuk tahun-tahun ini kan kegiatan infrastruktur kan sudah

---

<sup>45</sup> Wawancara Dengan Evi Lismawati Selaku Kaur Perencanaan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

dikurangi lah artinya kegiatan infrastruktur untuk tahun ini sudah menjadi bukan prioritas lagi”.<sup>46</sup>

Dua narasumber tersebut tentu dapat memberikan pendapat yang menunjukkan bahwa didalam tahap perencanaan, pemerintah Desa memiliki wewenang penting dalam mengarahkan agar penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh pendamping dusun bahwa:

“Kaitannya dengan masalah pemerataan kita sesuaikan mengenai masalah anggaran, karena disini kita ada beberapa dana yang bersumber dari Dana Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bantuan provinsi. Disamping itu ada bantuan yang bersifat dari dana aspirasi atau dari anggota dewan. Kalau aspirasi biasanya kebijakannya adalah bukan desa yang menentukan tetapi permintaan dari masyarakat langsung ke anggota dewan. Misalkan disuatu tempat butuh jalan yang mana pada awalnya mungkin tidak bisa didanai oleh Dana Desa, bisa sih bisa cuma anggaran terbatas makanya masyarakat mengajukan proposal ke anggota dewan. Kalo pemerataan memang setiap tahunnya pembangunan itu masing-masing kadus mempunyai kegiatan, biasanya dari anggaran yang ada khususnya yang masuk ke bidang pembangunan berapa persentasenya biasanya kita bagi sesuai dengan komposisi kebutuhan, karena disetiap wilayah memiliki masing-masing kebutuhan yang berbeda”.<sup>47</sup>

Hasil pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang telah di sepakati bersama akan dibuatkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang memuat tentang Rencana Penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat karena RKPDesa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 1 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir telah sesuai dengan ketentuan yang

<sup>46</sup> Wawancara Dengan Daryono Selaku Kasi Kesejahteraan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

<sup>47</sup> Wawancara Dengan Junarto (Kadus I), Hartoyo (Kadus II), Piliyanto (Kadus III) Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

berlaku dimana diawali dengan kegiatan musyawarah atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) guna membahas rancangan pembangunan yang akan dilaksanakan, Musrembang ini melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat. Tujuan diadakannya Musrembang tersebut adalah untuk mendorong masyarakat agar turut serta atau berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan dan hasil dari musyawarah tersebut akan dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Desa Lumbir.

Berikut data perencanaan pembangunan fisik Desa Lumbir tahun 2021 dengan menggunakan dana desa yang penulis peroleh dari hasil data olahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Desa Lumbir tahun 2021.

**Tabel: 4.2**  
**Rencana Pembangunan Fisik Desa Lumbir Tahun 2021**

No.	Bentuk Pembangunan	Wilayah
1	Pemeliharaan Jalan	Masing-masing RW
2	Rabat Beton Jalan Lingkungan	RT 05 RW 04
3	Peningkatan Jalan	RT 05-RT 04
4	Peningkatan Jalan & Talud Wilayah Utara Sungai	RT 05-RT 04
5	Pemeliharaan Jalan Desa/Rabat Beton Pembangunan Talud	RT 03 RW 08

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rencana pelaksanaan pembangunan Desa Lumbir yang dilakukan dengan menggunakan Dana Desa pada tahun 2021 berjumlah lima (5) kegiatan yaitu: Pemeliharaan Jalan, Rabat Beton Jalan Lingkungan, Peningkatan Jalan, Peningkatan Jalan & Talud Wilayah Utara Sungai, Pemeliharaan Jalan Desa/Rabat Beton Pembangunan Talud.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah dimulai dan dilaksanakannya pembangunan desa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Pembangunan desa

dilaksanakan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa) untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai dengan Dana Desa harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat desa setempat.

Wawancara dengan Bapak Hartoyo (Kadus II) mengatakan bahwa:

“Bentuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Lumbir dilakukan dengan swakelola, dimana kami merekrut para pekerja dari masyarakat Desa Lumbir sendiri, hal ini guna tidak menyia-nyiaakan sumber daya manusia yang ada dalam desa”.<sup>48</sup>

Wawancara dengan Bapak Daryono (Kasi Kesejahteraan) mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan program kegiatan pembangunan Di Desa Lumbir sering mengalami keterlambatan dari waktu yang telah dilaksanakan dengan alasan cuaca yang kurang mendukung, sehingga pekerjaan pembangunan yang tidak tepat waktu sesuai dengan jadwal yang direncanakan, apalagi lokasi pembangunan yang jauh mengharuskan material dilangsir. Hal ini tentunya menghambat pembangunan, diharapkan agar pemerintah desa dapat memiliki kebijakan dalam mengatasi permasalahan ini supaya untuk kedepannya tidak ada lagi hambatan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan. Hal ini tentunya berdampak terhadap kegiatan pembangunan untuk selanjutnya”.<sup>49</sup>

Hal serupa juga disampaikan dalam hasil wawancara dengan Bapak Piliyanto (Kadus III) mengatakan bahwa:

---

<sup>48</sup> Wawancara Dengan Hartoyo (Kadus II) Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

<sup>49</sup> Wawancara Dengan Daryono selaku Kasi Kesejahteraan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

“Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur sering mengalami keterlambatan dari rancangan waktu kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada saat yang telah ditetapkan dalam musyawarah”.<sup>50</sup>

Bapak Sulito (Ketua RW 02) juga mengatakan hal yang tak jauh berbeda dalam wawancara yang penulis lakukan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat yang tinggal tidak jauh dari lokasi kegiatan pembangunan, sering melihat sebagian dari para pekerja datang terlambat untuk bekerja, waktu yang digunakan untuk beristirahat juga lebih banyak digunakan dari pada untuk bekerja”.<sup>51</sup>

Hasil wawancara yang penulis lakukan di atas dapat dilihat bahwa dalam tahap pelaksanaan mengalami permasalahan, *pertama* dalam segi cuaca yang kurang mendukung menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. *Kedua* dalam partisipasi masyarakat atau pekerja kegiatan yang masih rendah.

Tahapan pelaksanaan Dana Desa harus berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Selain itu setiap penggunaan biaya atau pengeluaran dana juga harus dibuatkan rincian anggaran biaya yang akan disahkan oleh kepala desa. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh informan Ibu Evi Lismawati (Kaur Perencanaan) mengatakan bahwa:

“Sebelum proses pelaksanaan program pembangunan dilakukan, dalam tahapan pencairan dana, Semua dana penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan berdasarkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan setiap rencana anggaran biaya diperiksa oleh Sekretaris Desa, setelah itu baru disetujui oleh Kepala Desa. Hal itu agar dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan sesuai anggaran yang telah di tetapkan”.<sup>52</sup>

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Lumbir dilaksanakan setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB)

---

<sup>50</sup> Wawancara Dengan Piliyanto (Kadus III) Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

<sup>51</sup> Wawancara Dengan Sulito (Ketua RW 02) Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

<sup>52</sup> Wawancara Dengan Evi Lismawati Selaku Kaur Perencanaan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

ditetapkan, pelaksana kegiatan kemudian mengajukannya kepada sekretaris desa untuk diperiksa, jika permintaan pembayaran oleh tim pelaksana sudah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan maka permintaan tersebut akan disetujui.

Mengenai program pelaksanaan pembangunan yang telah terlaksana di Desa Lumbir Sekretaris Desa Lumbir mengatakan bahwa:

“Pembangunan yang terlaksana pada Desa Lumbir pada tahun 2021 digunakan untuk Pemeliharaan Jalan Desa, Rehabilitasi/pengerasan Jalan Desa, Pembangunan Jalan Lingkungan, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Jembatan Desa, Rehabilitasi Pemakaman Desa, Pembangunan Talud/tanggul Desa. Sedangkan pada tahun sebelumnya sebagian Dana Desa di gunakan untuk penanggulangan Covid-19 seperti pembuatan rumah isolasi dan juga untuk bantuan sembako kepada masyarakat”.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan pada tahun 2021 di gunakan untuk Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan Desa, Pembangunan Jalan Lingkungan, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Jembatan Desa, serta Pembangunan Talud/tanggul. Sedangkan untuk tahun sebelumnya dana desa digunakan untuk penanggulangan Covid-19.

**Tabel: 4.3**

**Program Pembangunan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas 2021**

<b>Program Pembangunan Tahun 2021</b>		
<b>No.</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Anggaran</b>
1	Pemeliharaan Jalan Desa	Rp. 149.984.250
2	Rehabilitasi Jalan Desa	Rp. 1.545.000.000
3	Pembangunan Jalan Lingkungan	Rp. 557.310.000
4	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rp. 401.400.000
5	Pembangunan Jembatan	Rp. 300.000.000
6	Pembangunan Talud/tanggul	Rp. 74.375.000

*Sumber: Data Olahan Dana Desa Lumbir 2021*

<sup>53</sup> Wawancara Dengan Karso Selaku Sekretaris Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 ada enam (6) bentuk pembangunan yang terlaksana yaitu Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan Desa, Pembangunan Jalan Lingkungan, Pembangunan Jalan Usaha Tani, Pembangunan Jembatan Desa, serta Pembangunan Talud/tanggul. Dana yang digunakan untuk Pembangunan Jalan Usaha Tani yaitu sebesar Rp. 401.400.000. sedangkan untuk Pembangunan Jalan Lingkungan sebesar Rp. 557.310.000.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan Dana Desa di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala dalam tahap pelaksanaan yaitu: dalam segi cuaca yang kurang mendukung menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan kurangnya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan.

### **3. Laporan dan pertanggung jawaban**

Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena memberikan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pengambilan keputusan ekonomi. Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab.

Pertanggung jawaban merupakan suatu poin penilaian yang sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lumbir karena dengan melalui pertanggungjawaban yang jelas harus sesuai dengan anggaran yang digunakan maka akan memberikan suatu gambaran yang bersifat transparansi dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDdesa) mempunyai dua tahap pelaporan. *Pertama*, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin setiap 6 bulan sekali sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berasal dari realisasi penerimaan

dan belanja Dana Desa. *Kedua*, laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang di hadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir Dana Desa.

Ibu Evi Lismawati (Kaur Perencanaan) mengatakan bahwa:

“Dalam tahap pelaporan ada dua yang harus di buat yaitu laporan berkala (laporan yang dibuat rutin dalam jangka waktu tertentu) dan laporan akhir. Laporan yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam pembuatan. Tujuan dari pelaporan ini yaitu untuk megetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, hambatan dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan”.<sup>54</sup>

Bapak Suwarjo (Kepala Desa) juga mengatakan bahwa:

“Dalam pelaporan Dana Desa, Kepala Desa bertanggung jawab penuh dan akan dituntut untuk menyampaikan laporan dengan tepat waktu. Karena jika tidak tepat waktu maka akan ada penundaan pencairan dana untuk tahap selanjutnya. Di Desa Lumbir sendiri dalam membuat laporan mengalami keterlambatan”.<sup>55</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Cariman selaku Kasi Pemerintahan Desa Lumbir yang mengatakan bahwa:

“Di Desa Lumbir dalam membuat laporan mengalami keterlambatan hal ini disebabkan karena yang pertama yaitu: belum maksimalnya kemampuan IT masing-masing Perangkat Desa dalam mengoperasikan perangkat komputer dalam pengelolaan keuangan/data informasi Desa yang semakin dituntut secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat. Kendala yang kedua yaitu: jaringan internet yang kurang maksimal dan sering terjadi gangguan, sehingga menghambat pelaporan-pelaporan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan”.<sup>56</sup>

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaporan Dana Desa ada 2 yaitu laporan berkala dan laporan akhir yang dibuat sesuai dengan peraturan bupati. Untuk di Desa Lumbir dalam hal pelaporan mengalami keterlambatan dikarenakan beberapa kendala yaitu: belum maksimalnya

<sup>54</sup> Wawancara Dengan Evi Lismawati Selaku Kaur Perencanaan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

<sup>55</sup> Wawancara Dengan Suwarjo Selaku Kepala Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

<sup>56</sup> Wawancara Dengan Cariman Selaku Kasi Pemerintahan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 27 Februari 2023

kemampuan IT masing-masing Perangkat Desa, dan jaringan internet yang sering mengalami gangguan. Dalam pertanggung jawaban Bapak Sarwin (Kaur Keuangan), mengatakan bahwa:

“Tingkat kejelasan pertanggung jawaban dilihat sebagai penilaian terhadap seluruh program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Lumbir. Setiap kali kegiatan yang dilaksanakan harus ada pertanggung jawaban yang jelas, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dengan banyaknya dana yang dikeluarkan atau dipakai. Selain itu dengan adanya pertanggung jawaban dapat diketahui apakah pemanfaatan dana desa tersebut sesuai dengan rancangan kegiatan yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan awal yang mencapai kesepakatan bersama”.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pertanggung jawaban sangat penting dalam kehidupan masyarakat Desa Lumbir karena melalui pertanggung jawaban yang dikeluarkan dengan sendirinya semua masyarakat akan mengetahui apakah keseluruhan program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan secara bersama atau tidak. Ibu Sartini (Kasi Pelayanan) juga mengatakan bahwa:

“Pertanggung jawaban dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting. Dikatakan penting karena pertanggung jawaban tersebut akan dijadikan evaluasi bagi kami perangkat desa atau pengelola dana untuk membenahi program kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan bukan hanya dana saja tetapi termasuk di dalamnya kualitas program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Laporan pertanggung jawaban ini ditetapkan dengan peraturan desa beserta laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dan laporan kekayaan milik Desa. Pertanggung jawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa yang dihadiri Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur-unsur masyarakat lainnya”.<sup>58</sup>

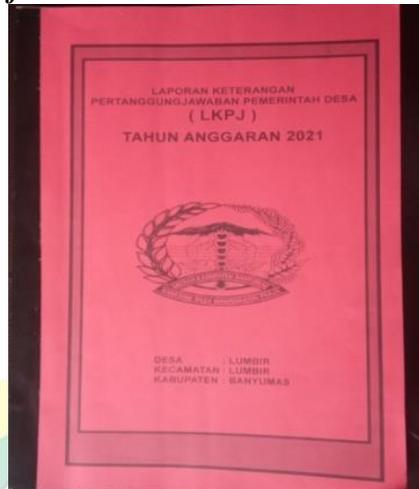
Dari hasil wawancara dengan Ibu Sartini dapat diketahui bahwa pertanggung jawaban akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan. Masih berkaitan dengan pertanggung jawaban.

---

<sup>57</sup> Wawancara Dengan Sarwin Selaku Kaur Keuangan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 27 Februari 2023

<sup>58</sup> Wawancara Dengan Sartini Selaku Kasi Pelayanan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 27 Februari 2023

**Gambar 4.1**  
**Profil LKPJ Desa Lumbir Tahun 2021**



*Sumber: Kantor Desa Lumbir Tahun 2021*

Gambar di atas dapat diketahui bahwa dalam tahap pertanggung jawaban program pembangunan dengan menggunakan Dana Desa di Desa Lumbir sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan adanya bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan bukti terealisasinya program Dana Desa di Desa Lumbir baik itu dalam Bidang Pembangunan maupun dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa pertanggung jawaban pemerintahan Desa Lumbir dalam pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bersifat terbuka atau transparan kepada masyarakat. Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah wajib memberikan laporannya kepada Camat ataupun ke Bupati. Dan pemerintah Desa juga harus menyampaikan pelaporan dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Namun, dalam hal pelaporan Desa Lumbir masih belum terlaksana secara maksimal dengan yang diharapkan karena, masih belum maksimalnya kemampuan IT masing-masing Perangkat Desa, dan jaringan internet yang sering mengalami gangguan, sehingga menghambat pelaporan-pelaporan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pengelolaan dana desa di Desa Lumbir berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2004 dimana dalam proses penganggaran melalui prosedur perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Di Desa Lumbir dalam tahap pelaksanaan dan pelaporan belum terlaksana sesuai dengan peraturan. Karena kendala dan hambatan dalam segi cuaca yang kurang mendukung, dengan letak geografis Desa Lumbir yang merupakan daerah pegunungan dan penyampaian pelaporan yang disebabkan belum maksimalnya kemampuan IT masing-masing Perangkat Desa, dan jaringan internet yang sering mengalami gangguan.

### **C. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas**

Penerapan pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Lumbir, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pemerataan, yaitu faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung merupakan faktor yang sangat penting dan dibutuhkan demi kelancaran suatu proses penguatan kapasitas hingga mencapai tujuan awal dari penguatan kapasitas tersebut. Sedangkan faktor penghambat yaitu faktor yang menjadi kendala dalam setiap kegiatan penguatan kapasitas dan faktor ini perlu dicari solusinya guna mengatasi kendala yang ada.

Berikut faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemerataan pembangunan jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas:

#### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lumbir sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Karso selaku Sekretaris Desa mengatakan bahwa:

“Kalau pendukungnya ya sumber daya alamnya di sini masih cukup tinggi”.<sup>59</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Junarto (Kadus I) yang mengatakan bahwa:

“Kalau faktor pendukung di samping wilayah Desa lumbir itu ada beberapa wilayah yang punya kekayaan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan”.<sup>60</sup>

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Bapak Hartoyo (Kadus II), dan Bapak Piliyanto (Kadus III), serta Bapak Daryono selaku Kasi Kesejahteraan dalam wawancara yang penulis lakukan, yang mengatakan bahwa:

“Pendukungnya kerjasama yang baik dari masyarakat dan sektoral pemdes, kerja bakti yang masih berjalan dan gotong royongnya”.<sup>61</sup>

“Faktor pendukungnya ya partisipasi masyarakat masih tinggi, sehingga untuk berswadaya itu masih mampu, masih kuat”.<sup>62</sup>

Penulis terus menggali informasi dengan mewawancarai ibu Evi Lismawati (Kaur Perencanaan) mengatakan bahwa:

“Kalau pendukung itu kalau menurut saya anggaran, kalau berapapun usulannya kalau ada anggarannya ya selesailah, walaupun tidak maksimal”.<sup>63</sup>

Beberapa hasil wawancara informan diatas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat dua faktor pendukung dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan desa, diantaranya partisipasi dari masyarakat masih tinggi, serta masih banyaknya Sumber Daya Alam

---

<sup>59</sup> Wawancara Dengan Karso Selaku Sekretaris Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

<sup>60</sup> Wawancara Dengan Junarto (Kadus I) Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

<sup>61</sup> Wawancara Dengan Hartoyo (Kadus II), dan Piliyanto (Kadus III) Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

<sup>62</sup> Wawancara Dengan Daryono Selaku Kasi Kesejahteraan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

<sup>63</sup> Wawancara Dengan Evi Lismawati Selaku Kaur Perencanaan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

yang bisa dimanfaatkan dalam pembangunan desa. Disisi lain anggaran masih bisa diminimalisir dengan memanfaatkan sumber daya alam di Desa Lumbir sendiri.

## 2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan terkendalanya pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lumbir sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi terganggu dan tidak terlaksana secara maksimal. Sebagaimana dapat dilihat dari wawancara penulis bersama Bapak Hartoyo (Kadus II) dan Piliyanto (Kadus III) mengatakan bahwa:

“Penghambatnya ya dana desa tidak memenuhi, letak geografis didesa lumbir yang lumayan ekstrim yakni pegunungan, sehingga banyak musibah longsor dan sebagainya ya sehingga aturan untuk fokus ke satu tempat harus terbelah menjadi beberapa”.<sup>64</sup>

Hasil wawancara informan berikut juga mengatakan hal yang serupa yaitu Bapak Daryono selaku Kasi Kesejahteraan yang mengatakan bahwa:

“Karena anggaran terbatas dan dibagi-bagi, apalagi infrastruktur bukan menjadi prioritas kegiatan tapi ada yang lebih prioritas lagi, contohnya pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, walaupun covid sudah tidak ada anggaran itu tidak boleh untuk infrastruktur semuanya, sekarang BLT masih ada untuk pemberdayaan masyarakatnya, ketahanan pangan sudah mulai contoh penyediaan kambing, penyediaan pupuk, dan bibit-bibit termasuk penanaman jagung. Faktor penghambatnya karena anggarannya terbatas. Apalagi beban pembangunan desa yang masih banyak, karena wilayahnya luas, sehingga beban pembangunan itu banyak, wilayahnya luas otomatis berpengaruh pada infrastruktur yang kita kerjakan. Sebenarnya dengan wilayah yang luas, penduduk yang banyak juga bisa menjadi pendukung. Dengan banyaknya masyarakat banyaknya warga, sepanjang kita bisa mengatur insyaallah kegiatan itu bisa jalan”.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Hartoyo (Kadus II), dan Piliyanto (Kadus III) Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

<sup>65</sup> Wawancara Dengan Daryono Selaku Kasi Kesejahteraan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan infrastruktur desa, diantaranya keterbatasan dana desa dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan, karena infrastruktur bukan menjadi prioritas lagi.

Berikut data panjang jalan dan jenis permukaan jalan Desa Lumbir tahun 2021.:

**Tabel: 4.4**  
**Data Panjang Jalan dan Jenis Permukaan Jalan Desa Lumbir Tahun 2021**

Aspal	Tidak Aspal	Lainya	Jumlah
49,076	23,475	12,230	84,781

Data panjang jalan dan jenis permukaan jalan di Desa Lumbir menunjukkan bahwa sebagian besar jalan teraspal, yaitu sebesar 58% dari total panjang jalan yang tersedia. Sedangkan sisanya sebanyak 28% adalah jalan yang tidak teraspal dan 14% sisanya adalah jenis permukaan lainnya.

Dapat diketahui bahwa jenis permukaan jalan yang teraspal memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan jenis permukaan jalan lainnya, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap kemudahan akses dan pelayanan transportasi menuju dan dari Desa Lumbir. Dalam hal ini, pembangunan jalan teraspal menjadi penting untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Desa Lumbir.

Namun, hal ini juga berdampak pada pemerataan pembangunan jalan di Desa Lumbir. Kendati jalan teraspal dapat memberikan dampak positif, namun pembangunan jalan tidak teraspal dan jenis permukaan lainnya juga perlu mendapatkan perhatian, karena tidak setiap daerah dapat menikmati jalan teraspal. Pembangunan jalan di Desa Lumbir harus dilakukan secara proporsional dan merata untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati transportasi dan akses yang baik.

Dengan demikian, data panjang jalan dan jenis permukaan jalan di Desa Lumbir menggambarkan peran penting pemerataan pembangunan jalan dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan teraspal harus dilakukan, namun tidak boleh melupakan pembangunan jalan tidak teraspal dan jenis permukaan lainnya yang juga penting untuk memberikan kesetaraan dalam aksesibilitas transportasi bagi seluruh masyarakat.

Berikut data kondisi jalan Desa Lumbir tahun 2021:

**Tabel: 4.5**  
**Data Kondisi Jalan Desa Lumbir Tahun 2021**

Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
22,671	23,900	12,785	25,425	87,781

Data panjang jalan dan kondisi jalan di desa Lumbir menunjukkan bahwa sebagian besar jalan di desa tersebut sudah dalam kondisi baik atau sedang. Namun, ada juga sekitar 15% jalan yang rusak atau rusak berat.

Hal ini bisa diartikan bahwa masih ada bagian desa yang belum terjangkau oleh program pembangunan jalan. Penting untuk dilakukan peningkatan pembangunan jalan di bagian-bagian tersebut agar masyarakat yang tinggal di sana dapat merasakan manfaat dari akses jalan yang lebih baik. Pemerataan pembangunan jalan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh masyarakat desa Lumbir dapat merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur jalan. Dengan pemerataan pembangunan jalan, seluruh masyarakat desa dapat terhubung dan terintegrasi dengan lebih baik, serta memungkinkan akses mobilitas yang lebih mudah dan cepat, sehingga membuka peluang bagi kemajuan ekonomi dan sosial di desa tersebut.

Banyaknya objek pemilik kendaraan dirinci menurut Kecamatan Lumbir tahun 2021 dapat dilihat dari tabel data berikut:

**Tabel 4.6**  
**Data Pemilik Kendaraan Kecamatan Lumbir Tahun 2021**

Roda 2/3	Roda 4/lebih	Jumlah
9.395	1.098	10.493

*Sumber: UPPD Kabupaten Banyumas BPPD Jateng*

Data banyaknya pemilik kendaraan di Desa Lumbir menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di desa tersebut memiliki kendaraan bermotor. Dari data tersebut terlihat bahwa kendaraan dengan roda 2 lebih mendominasi dengan jumlah 9.395 unit, sementara kendaraan dengan roda 4 atau lebih hanya sebanyak 1.098 unit.

Kaitannya dengan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan, data ini menunjukkan bahwa pembangunan jalan di desa Lumbir harus didesain untuk dapat menampung kedua jenis kendaraan tersebut, baik dengan roda 2 maupun roda 4 atau lebih. Hal ini penting untuk memastikan infrastruktur jalan dapat dibangun dengan maksimal dan efektif, sehingga tidak membatasi mobilitas penduduk dan mempercepat proses transportasi di Desa Lumbir. Selain itu, dengan adanya lebih banyak kendaraan roda 2 di Desa Lumbir, maka pembangunan infrastruktur jalan harus memperhatikan juga kebutuhan pejalan kaki serta pengendara sepeda. Dalam hal ini, penting untuk menyediakan trotoar yang baik dan aman serta menyediakan jalur sepeda untuk memastikan keselamatan dan kemudahan akses bagi seluruh penduduk Desa Lumbir. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan semua pihak.

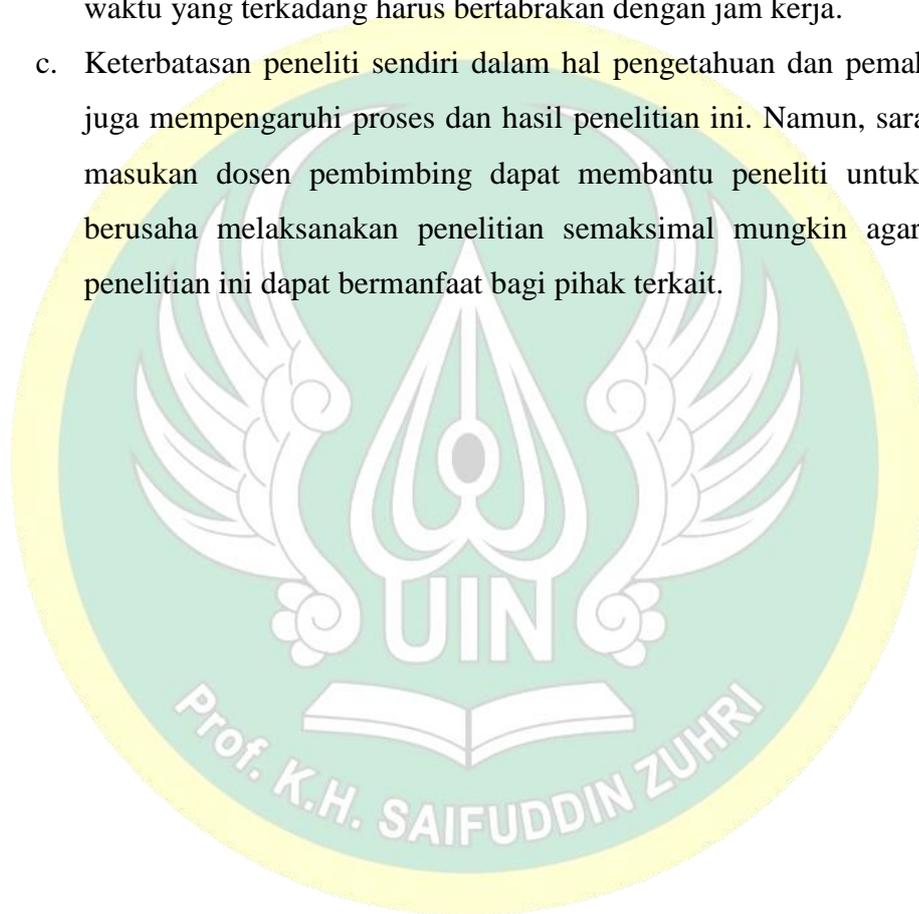
### **3. Keterbatasan Peneliti**

Penelitian ini masih banyak kekurangan karena disebabkan oleh berbagai hal. Banyak kendala yang dialami oleh peneliti baik ketika menggali data penelitian maupun ketika mengolah dan menganalisis data tersebut. Peneliti telah berusaha semaksimal mungkin agar hasil peneliti dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Namun, sebagai manusia biasa

peneliti pasti masih memiliki kekurangan dalam melaksanakan penelitian.

Adapun keterbatasan penelitian ini antara lain:

- a. Keterbatasan dalam objek penelitian, dalam penelitian ini peneliti hanya meneliti tentang pemerataan pembangunan infrastruktur jalan desa, tidak secara menyeluruh.
- b. Keterbatasan waktu penelitian yang dikarenakan lokasi penelitian yang jauh dari tempat tinggal, dan dari informan sendiri susah membagi waktu yang terkadang harus bertabrakan dengan jam kerja.
- c. Keterbatasan peneliti sendiri dalam hal pengetahuan dan pemahaman juga mempengaruhi proses dan hasil penelitian ini. Namun, saran dan masukan dosen pembimbing dapat membantu peneliti untuk tetap berusaha melaksanakan penelitian semaksimal mungkin agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa:

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas tahapan diawali dari musyawarah di lingkungan RW (musdus) guna membahas rancangan pembangunan yang akan dilaksanakan, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat dan usulan dibawa ke desa, yang nantinya dituangkan dalam RKP (Rencana Kegiatan Pemerintahan) yang dibahas bersama-sama dalam acara Musrenbangdes (musyawarah kegiatan pembangunan desa) untuk menentukan RKP yang di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur. Tujuan diadakannya musrembang tersebut adalah untuk mendorong masyarakat agar turut serta atau berpartisipasi dalam menyusun dan menentukan rencana kegiatan pembangunan dan hasil dari musyawarah tersebut akan dimasukkan kedalam (RAB) Rancangan Anggaran Belanja Desa Lumbir.

Terlepas dari itu pembangunan infrastruktur jalan di Desa Lumbir perlu dilakukan secara proporsional dan merata untuk memastikan seluruh masyarakat dapat menikmati transportasi dan akses yang baik. Perlu juga memperhatikan keberadaan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 atau lebih serta kebutuhan pejalan kaki dan pengendara sepeda. Dalam hal ini, penting untuk menyediakan trotoar yang baik dan aman serta jalur sepeda untuk memastikan keselamatan dan kemudahan akses bagi seluruh penduduk Desa Lumbir. Pemerataan pembangunan jalan menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh masyarakat desa Lumbir dapat merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur jalan, membuka peluang bagi kemajuan ekonomi dan sosial di desa tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Lumbir, ada beberapa catatan penting dari peneliti diantaranya yaitu:

1. Sebagai pemerintah desa, dalam proses pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban agar ditingkatkan lagi pengawasannya terutama dalam tahap pelaksanaan dan pelaporan. Di dalam tahap pelaksanaan diharapkan pemerintah desa membuat kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi disaat pelaksanaan kegiatan.
2. Untuk pelaporan perangkat desa selaku tim pelaksana kegiatan diharapkan mampu menguasai IT dalam mengoperasikan perangkat komputer dalam pengelolaan keuangan/data informasi desa. Karena pada era teknologi sekarang sangat dibutuhkan dalam penyampaian laporan agar tidak terjadi lagi keterlambatan untuk kedepannya.

## C. Penutup

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan ridha-Nya, sehingga lindungan dan bimbingannya serta memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi penerang bagi kita semua umatnya dan memberikan teladannya dan kasih sayangnya.

Sebagai manusia biasa yang tak mungkin sempurna, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Tapi bagi penulis tulisan ini merupakan tulisan yang sangat berharga. Besar harapan saya, tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan umat manusia pada umumnya kemudian saran dan kritik yang konstruktif akan sangat berguna bagi tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adianto, dkk, “*Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Logas Tanah Daratan Kabupaten Kuanta Singingi*”, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan, (Vol 4, No 1, Januari-Juni 2013).
- Amanda Zulfikri, “Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, [http://catatanpamong.blogspot.co.id/2014/01/undang-undang\\_No\\_6tahun\\_2014](http://catatanpamong.blogspot.co.id/2014/01/undang-undang_No_6tahun_2014).
- Anisa Inayatul Aini dengan judul “Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Bnadar Lampung Tahun 2009-2015 Perspektif Ekonomi Islam. (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015).
- Aprilia Khumaira, “*Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Menunjang Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Nagari Rao Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar*”, skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2021.
- Dr. Drs. Rulam Ahmad, M.Pd, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2020).
- Hapsari Tanjung, dengan Judul “*Pengaruh Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*”, (Skripsi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).
- Haryono & Amirul Hadi, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”, (Bandung:Pustaka Setia, 1998).
- Hasil Wawancara Dengan Daryono Selaku Kasi Kesejahteraan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023.
- Hasil Wawancara Dengan Evi Lismawati Selaku Kaur Perencanaan Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023.
- Hasil Wawancara Dengan Junarto (Kadus I), Hartoyo (Kadus II), Piliyanto (Kadus III) Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023.
- Hasil Wawancara Dengan Karso Selaku Sekretaris Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023.

- Hasil Wawancara Dengan Sulito (Ketua RW 02) Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023.
- Hasil Wawancara Dengan Suwarjo Selaku Kepala Desa Lumbir, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada Tanggal 24 Februari 2023.
- Herdiansyah Haris, “Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial”, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).
- Hermanto, H., Meiyani, E., & Risfaisal, R. (2019). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Layang A.P Pettarani Di Kota Makassar. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 7 (1), 198–205. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v7i1.2620>.
- Heryanti, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat)*” (Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah : Lampung, 2018).
- Kartasasmita Ginandjar, *Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat* (Surabaya: t.p.,1997).
- Kasryno Faisal, *Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 1984).
- Manan Abdul, *Dinamika Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2018).
- Marzali Amri, *Antropologi & Pembangunan Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011).
- Murba, dengan Judul “Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Di Desa Ericinnong Kecamatan Bontotani Kabupaten Bone” (*Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan politik Jurusan Ilmu Politik, 2017*).
- Mutthoriq, dkk. “Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2 , No 3.
- Nofitri, *Gambaran Kualitas Hidup Penduduk Dewasa pada Lima Wilayah Jakarta*, Skripsi, (Depok: Universitas Indonesia, 2009).
- P Siagian Sondang, *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi* (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2001).
- Parwadi Redatin, *Sosiologi Pembangunan* (Jakarta: Untan Press, 2013).

perundangan/undang-undang/uu-no25-tahun-2004-tentang-sistem-perencanaan-pembangunan-Tersedia dari situs <http://bappenas.go.id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan>.

Priyanto Djuni, *Penyusunan RPJM desa*, (Jakarta: Yayasan Penabulu, 2015).

Prof. Dr. Lexy J. Moleong, M.A, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

Sanjaya Wina, “Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, R & D”, (Jakarta:Kencana Prenada, 2013).

Siregar Shofia, “Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan” (Jakarta:PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017).

Soekanto Soerjono, *Sosiologi suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Persada, 2013).

Sudarni, dengan judul “Politik Anggaran Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto”, (*Skripsi Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Poltik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015*).

Sugiharsono, dkk., *Ilmu Pengetahuan Sosial kelas VIII Edisi 4* (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R & D”, (Bandung:Alfabeta, 2010).

Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Refika Aditama: Bandung, 2014).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## Lampiran I : Pedoman Wawancara

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Pengantar

1. Memperkenalkan diri berupa nama dan asal universitas.
2. Menjelaskan tujuan dan dari wawancara jadi saya ingin melakukan penelitian mengenai skripsi saya.
3. Wawancara dimulai setelah meminta izin untuk memulai wawancara.

#### KEPALA DESA

Daftar pertanyaan diajukan dalam rangka untuk mencari data penelitian tentang “Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”. Jawaban-jawaban ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan penelitian akan disampaikan sebagai berikut:

#### A. Identitas Informan

1. Nama : Suwarjo
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 56
4. Pekerjaan : Perangkat Desa Lumbir

#### B. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?
3. Bagaimana proses perumusan kebijakan dalam bidang pembangunan di Desa Lumbir?
4. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?

## **SEKRETARIS DESA**

Daftar pertanyaan diajukan dalam rangka untuk mencari data penelitian tentang “Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”. Jawaban-jawaban ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan penelitian akan disampaikan sebagai berikut:

### **A. Identitas Informan**

1. Nama : Karso
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 55
4. Pekerjaan : Perangkat Desa Lumbir

### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?
3. Bagaimana proses perumusan kebijakan dalam bidang pembangunan di Desa Lumbir?
4. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?



## **KAUR PERENCANAAN**

Daftar pertanyaan diajukan dalam rangka untuk mencari data penelitian tentang “Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”. Jawaban-jawaban ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan penelitian akan disampaikan sebagai berikut:

### **A. Identitas Informan**

1. Nama : Evi Lismawati
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 45
4. Pekerjaan : Perangkat Desa Lumbir

### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?
3. Bagaimana proses perumusan kebijakan dalam bidang pembangunan di Desa Lumbir?
4. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?



## **KASI KESEJAHTERAAN**

Daftar pertanyaan diajukan dalam rangka untuk mencari data penelitian tentang “Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”. Jawaban-jawaban ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan penelitian akan disampaikan sebagai berikut:

### **A. Identitas Informan**

1. Nama : Daryono
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 50
4. Pekerjaan : Perangkat Desa Lumbir

### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?
3. Bagaimana proses perumusan kebijakan dalam bidang pembangunan di Desa Lumbir?
4. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?



## **KEPALA DUSUN ( I )**

Daftar pertanyaan diajukan dalam rangka untuk mencari data penelitian tentang “Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”. Jawaban-jawaban ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan penelitian akan disampaikan sebagai berikut:

### **A. Identitas Informan**

1. Nama : Junarto
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 57
4. Pekerjaan : Perangkat Desa Lumbir

### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?
3. Bagaimana proses perumusan kebijakan dalam bidang pembangunan di Desa Lumbir?
4. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?



## **KEPALA DUSUN ( II )**

Daftar pertanyaan diajukan dalam rangka untuk mencari data penelitian tentang “Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”. Jawaban-jawaban ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan penelitian akan disampaikan sebagai berikut:

### **A. Identitas Informan**

1. Nama : Hartoyo
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 55
4. Pekerjaan : Perangkat Desa Lumbir

### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?
3. Bagaimana proses perumusan kebijakan dalam bidang pembangunan di Desa Lumbir?
4. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?



### **KEPALA DUSUN ( III )**

Daftar pertanyaan diajukan dalam rangka untuk mencari data penelitian tentang “Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”. Jawaban-jawaban ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan penelitian akan disampaikan sebagai berikut:

#### **A. Identitas Informan**

1. Nama : Piliyanto
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 45
4. Pekerjaan : Perangkat Desa Lumbir

#### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?
3. Bagaimana proses perumusan kebijakan dalam bidang pembangunan di Desa Lumbir?
4. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?



## **KETUA RW 02**

Daftar pertanyaan diajukan dalam rangka untuk mencari data penelitian tentang “Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas”. Jawaban-jawaban ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk melakukan analisis terhadap masalah penelitian. Adapun pertanyaan penelitian akan disampaikan sebagai berikut:

### **A. Identitas Informan**

1. Nama : Sulito
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 60
4. Pekerjaan : Petani

### **B. Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?
3. Bagaimana proses perumusan kebijakan dalam bidang pembangunan di Desa Lumbir?
4. Bagaimana pengelolaan Dana Desa dalam pemerataan pembangunan di Desa Lumbir?



## **Lampiran II : Dokumentasi Penelitian**

### **Kondisi Jalan Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas**



### **Kegiatan Pengaspalan Jalan Lingkungan**



## Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Rabat Beton Jalan Lingkungan



## Kegiatan Pembangunan Talut Jalan Tani



**Wawancara Peneliti dengan Suwarjo Selaku Kepala Desa Lumbir  
Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas**



**Wawancara Peneliti dengan Karso Selaku Sekretaris Desa Lumbir  
Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas**



**Wawancara Peneliti dengan Evi Lismawati Selaku Kaur Perencanaan Desa  
Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas**



**Wawancara Peneliti dengan Daryono Selaku Kasi Kesejahteraan Desa  
Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas**



**Wawancara Peneliti dengan Junarto Selaku Kepala Dusun  
( I ) Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas**



**Wawancara Peneliti dengan Hartoyo Selaku Kepala Dusun  
( II ) Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas**



**Wawancara Peneliti dengan Piliyanto Selaku Kepala Dusun  
( III ) Desa Lumbir Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas**



**Wawancara Peneliti dengan Sulito Selaku Ketua RW 02 Desa Lumbir  
Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas**



**Prasasti Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan**



## BIOGRAFI PENULIS

Nama : Faisal Abidin  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 02 Juni 2001  
Alamat : Desa Jlegong Dukuh Cangar Rt.05 Rw.02  
Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status : Mahasiswa  
No. Hp : 62 819-1279-8694  
Email : [abidinfaisal949@gmail.com](mailto:abidinfaisal949@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. MI Miftahul Huda : 2007-2013
2. MTs Negeri 02 Jepara : 2013-2016
3. MA Negeri 02 Jepara : 2016-2019
4. UIN SAIZU Purwokerto : Dalam Proses